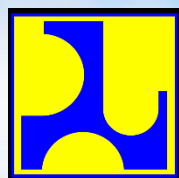




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Program yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2024, Secara umum capaian kinerja sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator program yang belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran perangkat daerah dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Februari 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197210272005011006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) target tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

Rincian target dan realisasi sasaran serta indikator sasaran dijabarkan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	77,63	78.24	100,79
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90,47	90.47	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81,4 (nilai)	81,32 (nilai)	99,9

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 adalah Rp. 63,283,756,968,- atau 96,48% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 65,589,325,000,-.

Capaian kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah diharapkan dapat terus meningkat di tahun-

tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama guna mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III	36
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Realisasi Anggaran	101
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	107
BAB IV	116
LAMPIRAN	xx
SK IKU PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA.....	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx
SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP DPUTRP 2025	xx
SK TIM EVALUASI SAKIP DPUTRP 2025	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Laporan akuntabilitas Kinerja ini disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan selaku unsur pembantu pimpinan, selalu berupaya melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/ sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/ sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/ sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagaimana tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan .

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

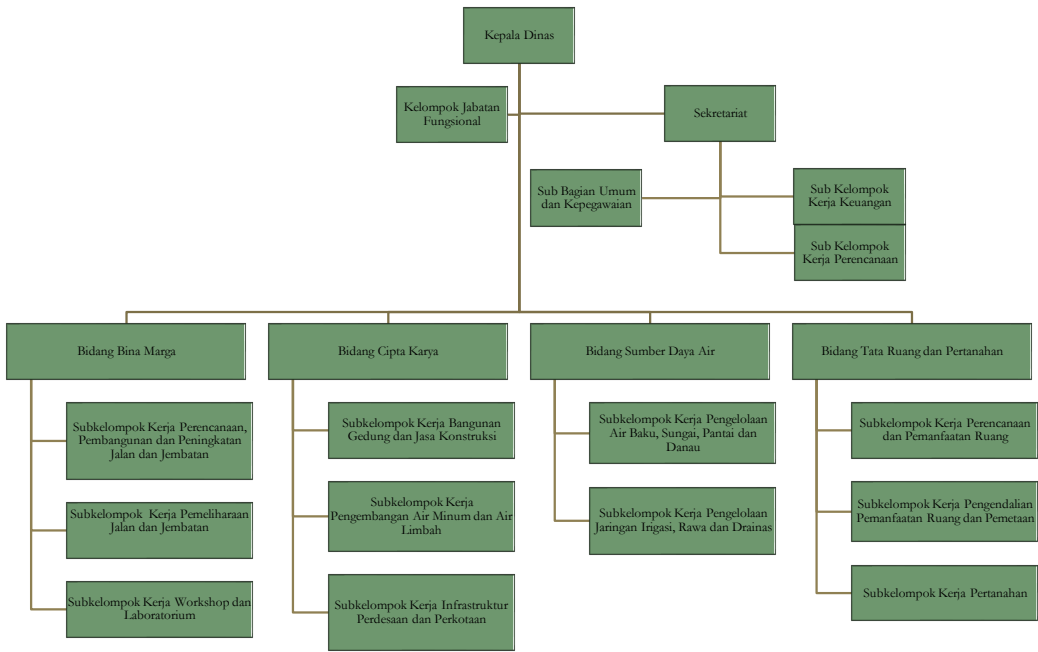
Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- A. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- B. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- D. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, UPT DPUTRP dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Bupati Bangka Tengah No: 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan perioseluzde 2021-2026 sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Bina Marga
 - a. Belum mantapnya kondisi seluruh ruas jalan pada SK Jalan Kabupaten dikarenakan anggaran pemeliharaan jalan yang terbatas.
2. Isu Strategis Bidang Cipta Karya
 - a. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar air minum
 - b. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar air limbah
 - c. Bangka Tengah melakukan pembangunan IPLT tetapi tidak adanya kepengurusan khusus dan belum adanya alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan menyebabkan bangunan tidak terawat.
 - d. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang belum merata

- e. Belum Terbentuknya Tim Ahli Bangunan Gedung
 - f. Masih rendahnya jumlah pekerja terampil di Bangka Tengah karena kurangnya kesadaran dari pelaku jasa konstruksi untuk mensertifikasi pekerja dan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah.
3. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)
- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber air baku, sungai dan kulong untuk memenuhi kebutuhan air
 - b. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan air pada jaringan irigasi untuk memenuhi tantangan ketahanan pangan
 - c. Penanganan Pengendalian Banjir yang belum terlaksana secara komprehensif.
4. Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- a. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan dan hasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik
 - b. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian Pemanfaatan ruang yang belum dilakukan secara konsisten
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah sebagai penggerak ekonomi daerah
 - d. Masih rendahnya luasan tanah yang memiliki sertifikat sehingga rentan terhadap terjadinya sengketa kepemilikan tanah
 - e. Terjadi perbedaan antara rencana program pembangunan dan investasi dengan rencana tata ruang

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Isu-Isu Strategis tersebut ditangani secara bertahap dan kontinu untuk pencapaian visi misi Bupati Bangka Tengah.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- 5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 6. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 Tentang APBD TA 2024 (LD 319) Tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (LD 330) Kabupaten Bangka Tengah Tanggal 11 Oktober 2024;
- 7. Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 (BD 1324), Tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (BD 1425), Tanggal 11 Oktober 2024.

E. **Sistematika**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas.

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah:
“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berkualitas Berlandaskan Iman Dan Taqwa
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul Dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan Dan Pengembangan IPTEK
3. **Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Publik Yang Unggul Dan Merata**
4. **Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan**
5. Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan mengacu pada Misi ke-3 , yaitu Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Publik Yang Unggul Dan Merata dan misi ke-4 yaitu Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1		1.1 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1 Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum						
2		2.2 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.2 Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan						
3		3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.3.3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)						

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,. Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Jalan Sesuai dengan Potensi Pengembangan Wilayah Pada Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Strategis Melalui Kelancaran Konektivitas Jaringan Jalan yang Lebih Merata					
	Meningkatnya kemantapan jalan pada kawasan prioritas bagi penguatan daya saing daerah	1.1. Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	Peningkatan pelayanan jaringan jalan melalui pemeliharaan jalan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas struktur jalan melalui pengembangan jaringan jalan sesuai standar dan berkeselamatan	Panjang Jalan Status Kabupaten Kondisi Mantap / Jumlah Panjang Jalan Status Kabupaten	DPUTRP
2	Tersedianya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman					

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian dekan akses air minum dan sanitasi yang layak	2.1 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Layak kepada Masyarakat Bangka Tengah	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak / Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kabupaten	DPUTRP
		2.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	Pemenuhan akses sanitasi Layak kepada Masyarakat Bangka Tengah	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Layak / Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kabupaten	DPUTRP
3	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air					
	Meningkatnya Luasan Sawah Yang Beririgasi	3.1 Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	Perluasan dan Pengembangan Titik Fokus Penanganan Daerah Irigasi	Luas Sawah Yang Beririgasi / Total Luas Sawah Kabupaten x 100 %	DPUTRP
	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	3.2 Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	Regulasi Dalam Pemeliharaan dan Menjaga Ketersediaan Air Baku	Jumlah Ketersediaan Air Baku dari Instalasi Pengolahan / Kebutuhan Pokok Air Baku Berdasarkan Target MDG's	DPUTRP
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	3.3 Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	Pembangunan yang Ramah Lingkungan Mempertimbangkan Tersedianya Resapan Air	Jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase / Jumlah Penduduk Kabupaten	DPUTRP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
4	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten						
	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	4.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	Pengawasan terhadap Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian Pemanfaatan ruang yang belum dilakukan secara konsisten	Realisasi Program Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang tahun yang bersangkutan / luas wilayah Bangka Tengah	DPUTRP
	Meningkatkan keteraturan dalam penyelenggaraan pertanahan	4.2	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	Membantu masyarakat untuk memiliki sertifikat kepemilikan luasan tanah	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani / Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	DPUTRP
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (PD)	5.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%			

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		5.2 Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%			

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 188.4/2515/DPUTR/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sKabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
-1	-2	-3		-4		-5	-6
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	73,87
				1.1.2	Persentase RumahTangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	89,80
				1.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,25
				1.1.4	Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	38,28
				1.1.5	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95,92
				1.1.6	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	67,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,35
				2.2.2	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	3.1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	80

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 ditetapkan pada Januari 2024 dengan uraian sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
-1	-2	-3		-4		-5	-6
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	73,87
				1.1.2	Persentase RumahTangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	89,80
				1.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,25
				1.1.4	Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	38,28
				1.1.5	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95,92
				1.1.6	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	67,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,35
				2.2.2	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	3.1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 ini melaksanakan program sebanyak 12 program dengan 57 Sub Kegiatan. Rincian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	80.5	9.173.205.100
		Nilai Sakip Perangkat Daerah (PD)	Nilai	81.32	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	6.871.593.100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	6.861.593.100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Laporan	2	9.950.000
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.950.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	23.000.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	5	15.000.000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	8.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	257.500.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.000.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	66.300.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12	1.200.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	100.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	3	809.440.000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	370.504.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.400.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	238.536.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah	Kegiatan	6	1.181.722.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	75.542.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	490.004.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	8	344.976.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	121.200.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	150.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari- Hari	%	95.96	1.920.864.000
		Persentase luas sawah yang beririgasi	%	41.48	
8	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit air baku yang dibangun/ direhab	Unit	1	857.792.000
23	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	Km	1,3	485.000.000
24	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dandipelihara	Unit	1	372.792.000
9	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ direhab/ ditingkatkan	Jaringan	1	1.003.699.739
25	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1	202.072.000

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0,81	861.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	%	90.15	2.936.861.000
10	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah SPAM yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/ dipelihara	SR	257	2.936.861.000
27	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	2	155.440.000
28	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	5	20.000.000
29	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	SPAM	5	1.369.000.000
30	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Perpipaan yang diperluas	SR	257	1.432.421.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	745.972.000
11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	745.972.000
31	Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	745.630.854
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,65	2.480.884.000
12	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septik yang dibangun	Unit	411	2.480.844.000
32	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	57	2.281.778.000
32	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	20	30.000.000

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
34	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	180	169.106.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	65	3.939.327.000
13	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang dibangun/ direhab/ dipelihara	M	7426	3.939.327.000
35	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	1600	1.066.640.000
36	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	548	300.000.000
37	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	1071	515.500.000
38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	1071	1.204.300.000
39	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	Meter	2136	1.628.675.000
40	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Pemeliharaan	Meter	1000	218.512.000
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung yang Ber-IMB	%	5.8	3.310.000.000
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang direncanakan/ dibangun/ direnovasi/ direhab	Unit	6	3.310.000.000
41	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	3.310.000.000
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	77.03	39.820.211.900
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Desa yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilebarkan	Km	97.42	39.820.211..900
42	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	49.600.000
43	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang di Bangun	Km	3.3	1.575.000.000
44	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	4.2	17.922.094.900

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
45	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	Km	8.92	17.537.857.000
46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Km	81	2.735.600.000
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	%	72.92	37.500.000
16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang	100	37.500.000
47	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Pekerja	100	37.500.000
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	80,91	1.109.500.000
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dok	2	153.400.000
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Dokumen	1	130.190.000
49	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan	Dokumen	1	23.210.000
17	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	Bulan	2	766.450.000
50	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	2	766.450.000
18	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Bulan	2	78.950.000
51	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Dokumen	1	45.750.000
52	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem	1	33.200.000

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
19	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Bulan	12	110.700.000
53	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	Jumlah Dokumen Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	Dokumen	1	25.000.000
54	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	85.700.000
XI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten	%	100	10.000.000
20	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus	10	10.000.000
55	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	10.000.000
XII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				30.000.000
21	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Dokumen	1	30.000.000
XIII	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				75.000.000
22	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75.000.000
JUMLAH ANGGARAN					65.589.325.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagaimana terdapat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SAT.	TARGET INDUK	TARGET PERUBAHAN
1	2	3		4		5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	73,87	77,35
				1.1.2	Persentase RumahTangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	89,80	89,80
				1.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,25	97,25
				1.1.4	Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	38,28	38,28
				1.1.5	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95,92	95,92
				1.1.6	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	67,18	67,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	2.2.1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,35	80,93
				2.2.2	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	3.1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	%	80	81,4

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

Akibat terjadinya perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sebagaimana Perubahan Perjanjian Kinerja pada tabel 2.6 di atas, maka terjadi beberapa

perubahan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2024 dengan rincian teradapat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	
					INDUK	PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	80.5	9.314.500.000	9.173.205.100
		Nilai Sakip Perangkat Daerah (PD)	Nilai	81.32		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	20.000.000	20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.000.000	15.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	5.000.000	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	6.879.310.000	6.871.593.100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	6.869.310.000	6.861.593.100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000	5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	5.000.000	5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Laporan	2	10.000.000	9.950.000
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000	5.000.000

7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000	4.950.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	50.000.000	23.000.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	25.000.000	15.000.000
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	25.000.000	8.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	297.500.000	257.500.000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	0
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	70.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	20.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	66.300.000	66.300.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12	1.200.000	1.200.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	100.000.000	100.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	3	831.000.000	809.440.000
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	384.640.000	370.504.000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.400.000	200.400.000

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245.960.000	238.536.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah	Kegiatan	6	1.226.690.000	1.181.722.000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	76.470.000	75.542.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	491.860.000	490.004.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	8	380.660.000	344.976.000
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	127.700.000	121.200.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	150.000.000	150.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95.96	1.964.000.000	1.920.864.000
		Persentase luas sawah yang beririgasi	%	41.48		
5	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit air baku yang dibangun/ direhab	Unit	1	900.000.000	857.792.000
21	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	Km	1.3	500.000.000	485.000.000
22	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dandipelihara	Unit	1	400.000.000	372.792.000

6	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ direhab/ ditingkatkan	Jaringan	1	1.064.000.000	1.063.072.000
23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1	100.000.000	250.060.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0.81	861.000.000	861.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	%	90.15	3.042.701.000	2.936.861.000
7	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah SPAM yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/ dipelihara	SR	257	3.042.701.000	2.936.861.000
24	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	2	100.000.000	115.440.000
26	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	5	20.000.000	20.000.000
27	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	SPAM	5	1.369.000.000	1.369.000.000
29	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Perpipaan yang diperluas	Unit	257	1.428.701.000	1.432.421.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	742.472.000	745.972.000
8	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	742.472.000	745.972.000
30	Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton	0.13	742.472.000	742.472.000

V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97.65	2.516.668.000	2.480.884.000
32	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septik yang dibangun	Unit	411	2.516.668.000	2.480.884.000
33	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	57	2.274.778.000	2.281.778.000
34	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	20	40.000.000	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	180	171.890.000	169.106.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	65	4.046.165.000	3.939.327.000
9	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang dibangun/ direhab/ dipelihara	M	7426	4.046.165.000	3.939.327.000
35	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	1600	1.070.690.000	1.066.640.000
36	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	548	300.000.000	300.000.000
37	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	1071	515.500.000	515.500.000
38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	2136	210.000.000	210.000.000
39	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	Meter	141	1.634.975.000	1.628.675.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Pemeliharaan	Meter	1000	315.000.000	218.512.000
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung yang Ber-IMB	%	5.8	2.580.000.000	3.310.000.000

10	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang direncanakan/ dibangun/ direnovasi/ direhab	Dokumen	6	2.580.000.000	3.310.000.000
40	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	2.580.000.000	3.310.000.000
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	77.03	39.099.822.000	39.820.211.900
11	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Desa yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilebarkan	Km	97.42	39.099.822.000	39.820.211.900
45	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	150.000.000	49.600.000
46	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang di Bangun	Km	3.3	1.575.000.000	1.575.000.000
48	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	4.2	17.944.815.000	17.922.094.900
49	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	Km	8.92	17.550.007.000	17.922.094.900
50	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Km	81	1.730.000.000	2.735.660.000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	%	72.92	150.000.000	37.500.000
12	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang	100	150.000.000	37.500.000
52	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Pekerja	100	150.000.000	37.500.000
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	80,91	1.275.000.000	1.109.500.000

15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dok	2	250.000.000	153.400.000
54	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Dokumen	1	200.000.000	130.190.000
55	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan	Dokumen	1	50.000.000	23.210.000
16	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	Dokumen	2	800.000.000	766.450.000
59	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	800.000.000	766.450.000
17	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Dokumen	2	100.000.000	78.950.000
60	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Dokumen	1	50.000.000	45.750.000
61	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	50.000.000	33.200.000
18	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Bulan	12	125.000.000	110.700.000
62	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	Jumlah Dokumen Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	Dokumen	1	25.000.000	25.000.000
63	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dokumen	1	100.000.000	85.700.000

XI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten	%	100	25.000.000	10.000.000
19	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus	10	25.000.000	10.000.000
64	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	25.000.000	10.000.000
XII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				205.000.000	30.000.000
20	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota				205.000.000	30.000.000
65	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	175000000	0
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Dokumen	1	30.000.000	30.000.000
XIII	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				0	75.000.000
21	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	75.000.000
67	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	75.000.000
JUMLAH ANGGARAN					62.807.993.000	65.589.325.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil yang baik sangat tinggi dimana indicator kinerja dapat tercapai dengan nilai realisasi kinerja lebih besar dari 91%. Secara rinci Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN S.D. TW IV 2024			SUMBER DATA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Jalan Sesuai dengan Potensi Pengembangan Wilayah Pada Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kelancaran Konektivitas Jaringan Jalan yang Lebih Merata	Indikator Tujuan: Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	77,35	77,03	99,59	DPUTRP
	Sasaran: Meningkatnya kemantapan jalan	Indikator Sasaran: Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten				
2	Tujuan: Tersedianya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Indikator Tujuan 1: Persentase Rumah Tangga yang Menempati	89.8	90.15	100	DPUTRP

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN S.D. TW IV 2024			SUMBER DATA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
		Hunian dengan Akses Air Minum layak				
	Sasaran: Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	Indikator Sasaran 1: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak				
		Indikator Tujuan 2: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	97.25	97.65	100	DPUTRP
		Indikator Sasaran 2: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak				
3	Tujuan: Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator Tujuan 1: Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	38.28	41.48	100	DPUTRP
	Sasaran 1: Meningkatkan Luasan Sawah Yang Beririgasi	Indikator Sasaran 1: Persentase Luas Sawah yang Beririgasi				
			Indikator Tujuan 2: Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan	95.92	95.96	100

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN S.D. TW IV 2024			SUMBER DATA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
	Sasaran 2: Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Pokok Minimal Sehari- Hari				
		Indikator Sasaran 2: Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari- Hari				
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sistem drainase	Indikator Tujuan 3: Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	67.18	67.18	100	DPUTRP
		Indikator Sasaran 3: Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase				
4	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten	Indikator Tujuan 1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	80,93	80,93	100	DPUTRP
	Sasaran 1: Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Indikator Sasaran 1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang				
		Indikator Tujuan 2: Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah	100	100	100,00	DPUTRP

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN S.D. TW IV 2024			SUMBER DATA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
5.	Sasaran 2: Meningkatkan keteraturan dalam penyelenggaraan pertanahan	yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	81.4	81.32	99.9	DPUTRP
		Indikator Sasaran 2: Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten				
		Indikator Sasaran 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)				
		Indikator Sasaran 2: Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik		78	80.5	100	DPUTRP

1. Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten

Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 diketahui persentase kondisi mantap jalan kabupaten adalah sebesar 77,03% dari target 77,35%, sehingga capaian kinerja tersebut terealisasi sebesar 99,59% dari target yang ditetapkan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama persentase kondisi mantap jalan kabupaten ini didukung dengan pendanaan yang bersumber dari gabungan dana pusat dan anggaran daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran DAK yang didapatkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak seluruhnya dapat direalisasikan mengingat terbatasnya APBD Kabupaten Bangka Tengah. Adapun capaian kinerja berdasarkan rumus pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 3.2. dan Alokasi Anggaran Penanganan Jalan 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Jalan Kondisi Mantap berdasarkan rumus pencapaiannya

Sumber: Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

URAIAN	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	311,05 Km (70,47%)	319,51 Km (72,39%)	316,34 Km (71,67%)	331,25 Km (75,05%)	321,64 Km (72,87%)	339,98 Km (77,03%)
Peningkatan Jalan	3,73 Km (1,20 %)	4,9 Km (1,53%)	7,53 Km (2,38%)	9,275 Km (2,80%)	5,4 Km (1,68%)	7,59 Km (2,23%)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan	305,75 Km (69,27 %)	312,74 Km (70,85%)	308,81 Km (69,29%)	321,975 Km (72,25%)	316,24 Km (71,19%)	332,41 Km (74,80%)

Bangka Tengah

Berdasarkan Data diatas dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 339,986 Km atau 77,03% dari target 77,35%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) tahun 2023 akhir adalah sepanjang 331,25 Km atau 75,05% dari total panjang jalan 441,39 Km. Jika disandingkan dengan capaian sasaran tahun 2023 di atas menunjukkan adanya peningkatan kemantapan jalan yaitu sepanjang 8,735 Km atau 1,98 % dari total panjang jalan kabupaten 441,39 Km, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor

188.45/206.2/DPURP/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/255/DPU/2012 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten.

Adapun program yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten adalah Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
- 3. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- 4. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- 5. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
- 6. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- 7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- 8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
- 9. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- 10. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat

Melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut hasil yang telah dicapai dapat tergambar dalam tabel kondisi fisik jalan kabupaten sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3.4
Kondisi Fisik Jalan Kabupaten

No.	Uraian	Panjang Jalan Kabupaten		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Kategori Kondisi Baik			
	1. Jalan Kondisi Baik	312,56 Km	324,70 Km	333,44 Km
	2. Jalan Kondisi Sedang	6,95 Km	6,55 Km	6,55 Km
	Total	317,36 Km	319,51 Km	339,98 Km
B	Kategori Kondisi Rusak			
	1. Jalan Kondisi Rusak Ringan	79,40 Km	67,35 Km	51,33 Km
	2. Jalan Kondisi Rusak Berat	42,48 Km	42,79 Km	50,07 Km
	Total	124,03 Km	121,88 Km	101,40 Km
	Total Panjang Jalan Kabupaten	441,39 Km	441,39 Km	441,39 Km

Sumber: Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah 2021 - 2026, IKU Presentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten merupakan salah satu indikator pendukung Indikator Rasio Ketersediaan

Infrastruktur bersama-sama dengan Indikator Ketersediaan Rumah Layak Huni.. Pada tahun 2024 target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD tersebut adalah sebesar 77,35% dengan realisasi sebesar 77,03% atau capaian sebesar 99,59 %.

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Penanganan Jalan 2020-2024

NO	ALOKASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APBD	11.003.339.000	19.296.676.600	22.573.950.000	42.144.988.250	28.162.933.900
2.	APBN/ (DAK)	10.890.390.000	7.799.050.000	16.701.001.000	16.978.482.750	11.657.278.000
3.	INPRES	-	-	-	69.127.145.000	-

Sumber: Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah

Kesimpulan yang dapat diambil dari pencapaian kinerja jalan kabupaten yaitu pemenuhan untuk mencapai Pencapaian IKU Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten adalah dengan :

1. upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan/ rekonstruksi jalan untuk menaikkan kemantapan jalan, dan
2. pemeliharaan rutin dan/atau berkala jalan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan agar berada pada kondisi tetap dan tidak menurun.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bangka Tengah difokuskan untuk penanganan kondisi jalan baik dan sedang agar dapat mempertahankan kondisi jalan ke kondisi semula. Dengan melihat kondisi dilapangan pada dasarnya anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp. 2.735.660.000,- tidak mencukupi untuk pemeliharaan jalan sepanjang 441,39 Km sebab dalam belanja sub keg tersebut meliputi pembayaran gaji PKK tenaga teknis pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah saat ini berupaya dengan keterbatasan anggaran untuk menjaga kondisi jalan yang dalam kondisi tidak mantap agar tetap dapat menjadi akses yang nyaman bagi para pengguna jalan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap melakukan pemeliharaan rutin yang bersifat sementara agar tidak menambah kerusakan minor

pada jalan seperti lobang atau kerusakan yang bersifat ekstrim sehingga kendaraan yang lewat dapat melintasi dengan aman, misalnya dengan melakukan perataan permukaan jalan, *patching* aspal dan tebasan pada bahu jalan.

2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : NOMOR 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif melalui sistem Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) dan Sistem Penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJB).

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/ sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Sedangkan SPAM BJB merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2024 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak mencapai 90,15% dari target 89,8%, bila dibandingkan dengan 93,59% target akhir dalam RPJMD 2026 maka persentase rumah tangga berakses air minum layak pencapaiannya adalah sebesar 94,61%. Adapun capaian kinerja berdasarkan rumus pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Target dan Realiasi Indikator Kinerja berdasarkan rumus pencapaiannya:

No	Rumus Indikator Kinerja	Target 2024		Realisasi 2024	
		Jml Rumah Tangga berakses air minum	%	Jml Rumah Tangga berakses air minum	%
1	Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	<u>60.132</u> 66.962	89,8	<u>60.366</u> 66.962	90,15
	Jumlah rumah tangga Kab. Bangka Tengah				
Persentase Capaian					100

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun 2024 sebesar 90,15% dengan jumlah rumah tangga penerima akses air minum sebesar 60,366 rumah tangga berbanding 60,132 rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 dengan total capaian 100% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 89,8% dengan 60.132 rumah tangga yang mendapat akses air minum. Ini artinya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum. Jika dibandingkan dengan 93,59% Target Capaian Akhir RPJMD 2026 maka pencapaian sasaran tahun berjalan sebesar 94,61%

Adapun program yang mendukung indikator Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
4. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
5. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Tabel 3.7
Daftar Paket Kegiatan Dan Jumlah Penerima Manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PAMSIMAS Tahun 2024

NO	NAMA DESA PENERIMA	JUMLAH BANTUAN	JENIS BANTUAN	SUMBER DANA
PAMSIMAS TAHUN 2024				
1	Air Mesuk	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
2	Kulur Ilir	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
3	Belimbing	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
4	Kemingking	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
5	Munggu	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
6	Romadhon	100 SR	Perpipaan dan Sambungan Rumah	APBN 2024
Total		600 SR		

Sumber : Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Tabel 3.8

Data Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih Tahun 2024

No	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						PERPIPAAN (PDAM, BPSSPAM)	RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH	
			SUMUR GALI TERLINDUNGI	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNGI	PENAMPUNGAN AIR HUJAN		JUMLAH AIR BERSIH	%
			RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA	RUMAH TANGGA PENGGUNA		
1	KOBA	14760	5,953	-	5,028	0	0	69	1583	13321	90.25%
2	PANGKALAN BARU	14552	2,326	-	8,625	36	0	0	2219	13206	90.75%
3	SIMPANGKATIS	8673	4,537	0	1,423	0	0	0	1993	7953	91.70%
4	SUNGAISELAN	12124	4,959	0	4,371	1	0	0	1407	10738	88.75%
5	NAMANG	5759	2,635	0	1,026	-	0	0	1723	5384	93.49%
6	LUBUK BESAR	11094	4,547	0	2,072	0	3	600	2545	9764	88.01%
TOTAL		66962	24957	3929	22545	37	3	669	11470	60366	90.15%

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2024 telah melampaui target dalam Renstra dan Renja Tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat dua indikator SPM yang harus terpenuhi 100% yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Teknis SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar
3. Penerima Pelayanan Dasar

Melalui ketentuan tersebut, SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah pengampu urusan. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, indikator SPM yang diemban telah sesuai dengan IKU Perangkat Daerah, serta IKK pada LPPD, sehingga pelaksanaan indikator kinerja menjadi tepat dan selaras.

Pada akhir 2024, capaian kinerja terkait pemenuhan air bersih masyarakat telah mencapai angka 90,15% dari target SPM 100%. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan SPM tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran pada Program SPM Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi) untuk Tahun 2024 biarpun telah bersumber dari APBD dan DAK 2024, tetapi dana DAK yang tersalurkan setiap tahunnya mengalami penurunan nominal. Hal ini menyebabkan menurunnya alokasi anggaran yang direncanakan dan dianggarkan pada program SPM Pekerjaan Umum sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja SPM untuk kedepannya. Namun solusi yang terus diupayakan oleh Perangkat Daerah adalah dengan bekerja sama

dengan stakeholder untuk terus berupaya mengajukan proposal Dana Alokasi Khusus kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar wilayah Bangka Tengah untuk tetap masuk ke daftar penerima Dana Alokasi Khusus. Selain itu, usulan-usulan kegiatan juga disampaikan pada pembahasan usulan kegiatan yang bersumber dari dana APBN, APBD 1, dan DABA.

3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses (Air Limbah Domestik) Layak

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dijelaskan bahwa salah satu Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak, target dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak, target dan capaian

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Kondisi 2023 Akhir	2024			Target RPJMD 2026	Capaian RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
2	Tersedianya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak						
2.2	Meningkat nya jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi yang layak						
2.1.1	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	96.65 %	97,25 %	97,65 %	100%	99,08 %	98,56 %

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa capaian rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak tahun 2024 sebesar 97,65%, dengan total capaian 100% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 97,25% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak. Berdasarkan jumlah rumah tangga yang menerima akses

sanitasi (air limbah domestik) layak, capaian tahun 2024 berjumlah 65.388 rumah tangga dari total 66.962 rumah tangga di bangka Tengah Tahun 2024 dan terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang menerima akses sanitasi (air limbah domestik) layak tahun 2024 sebesar 65.388 rumah tangga dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 65.364 rumah tangga. Untuk lebih jelas, target dan realiasi Indikator Kinerja rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dapat dilihat pada table 3.10 dan data rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.10
Target dan Realiasi Indikator Kinerja rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak

No	Rumus Indikator Kinerja	Tahun 2023	Target 2024		Realisasi 2024	
		%	rumah tangga yang menempati hunia dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	rumah tangga yang menempati hunia dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%
1	rumah tangga yang menempati hunia dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak Jumlah rumah tangga Kab. Bangka Tengah	96,65	$\frac{65.121}{66.962}$	97,25	$\frac{65.388}{66.962}$	97,65
Persentase Capaian						100

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Adapun program yang mendukung indikator Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Target dan realisasi program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Realisasi program/ kegiatan indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak

NO.	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)
	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.480.884.000	2.458.393.959	99,09

	KEGIATAN: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.480.884.000	2.458.393.959	99,09
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.281.778.000	2.277.658.949	99.82
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	30.000.000	29.880.000	99.60
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	169.106.000	150.855.010	89.21

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.
Bangka Tengah

Melalui program ini hasil yang telah dicapai dapat tergambar dalam tabel penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai yang dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12

Data rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak Tahun 2024

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	JENIS SARANA AIR LIMBAH								
			SPALD - T					SPALD - S			
			IPALD SKALA PERMUKIMAN	IPALD SKALA PERKOTAAN	IPALD SKALA KAWASAN	TOTAL SPALD - T	PERSENTASE SPALD-T	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	CUBLUK	TOTAL SPALD - S	PERSENTASE SPALD-S
	KOBA	14760	450	0	0	450	3,05%	457	13.576	14.033	98,12%
	PANGKALAN BARU	14552	247	0	0	247	1,70%	244	13.675	13.919	97,35%
	SIMPANG KATIS	8673	100	0	0	100	1,15%	294	8.116	8.410	98,12%
	SUNGAI SELAN	12124	450	0	0	450	3,71%	192	11.092	11.284	96,78%
	NAMANG	5759	200	0	0	200	3,47%	167	5.284	5.451	98,12%
	LUBUK BESAR	11094	465	0	0	465	4,19%	468	9.911	10.379	97,75%
JUMLAH		65364	1912	0	0	1,912	2.86%	1822	61654	63476	97,65%
TOTAL SPALDS DAN SPLDT										65388	97,65%

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Tabel 3.13
Daftar Paket Kegiatan dan Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan DAK
Bidang Sanitasi 2024

NO	NAMA DESA PENERIMA	JUMLAH BANTUAN	JENIS BANTUAN	SUMBER DANA
SANIMAS TAHUN 2024				
1	Batu Beriga	23 Unit	Bilik Toilet ,Tangki Septik,dan Resapan	APBN 2024
2	Nibung	23 Unit	Bilik Toilet ,Tangki Septik,dan Resapan	APBN 2024
3	Kebintik	24 Unit	Bilik Toilet ,Tangki Septik,dan Resapan	APBN 2024
4	Kelurahan Sungaiselan	23 Unit	Bilik Toilet ,Tangki Septik,dan Resapan	APBN 2024
Total		93 Unit		
SANITASI (LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN) LPK 2024				
1	Pondok Pesantren Sahabat Quran II	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
2	Pondok Pesantren Zaid Bin Tsabit Desa Nibung	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
3	Pondok Pesantren Quran Cahaya	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
4	Pondok Pesantren Nurul Ihsan	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
5	Pondok Pesantren Khoirul Ummah	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
6	Pondok Pesantren Bahrul Huda Desa Sarang Mandi	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
7	Pondok Pesantren Miftahul jannah	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
8	Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Ma'ruf	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
9	Pondok Pesantren Riyadhul Muhibbin	1 Unit	Gedung Sanitasi Pesantren	APBN 2024
Total		9 Unit		

Sumber: Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab. Bangka Tengah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat dua indikator SPM yang harus terpenuhi 100% yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Teknis SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar
3. Penerima Pelayanan Dasar

Melalui ketentuan tersebut, SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah pengampu urusan. Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, indikator SPM yang diemban telah sesuai dengan IKU Perangkat Daerah, serta IKK pada LPPD, sehingga pelaksanaan indikator kinerja menjadi tepat dan selaras.

Pada akhir 2024, capaian kinerja terkait pemenuhan sanitasi masyarakat telah mencapai angka 97,65% dari target SPM 100%. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan SPM tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran pada Program SPM Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi) untuk Tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan DAK 2024, tetapi dana DAK yang tersalurkan setiap tahunnya mengalami penurunan nominal. Hal ini menyebabkan menurunnya alokasi anggaran yang direncanakan dan dianggarkan pada program SPM Pekerjaan Umum sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja SPM untuk kedepannya. Namun solusi yang terus diupayakan oleh Perangkat Daerah adalah dengan bekerja sama dengan stakeholder untuk terus berupaya mengajukan proposal Dana Alokasi Khusus kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar wilayah Bangka Tengah masuk ke dalam lokus/ penerima Dana Alokasi Khusus. Selain itu, usulan-usulan kegiatan

juga disampaikan pada pembahasan usulan kegiatan yang bersumber dari dana APBN, APBD 1, dan DABA.

4. Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 131 Tahun 2021 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Salah satu Indikator Tujuannya adalah Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari. kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Adapun sasaran penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 131 Tahun 2021 tersebut di atas dijelaskan bahwa indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang ketiga adalah Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14
Target dan realisasi kinerja Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Kondisi 2023 Akhir (%)	2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air				
3.1	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku				
3.1.1	Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	95,70	95,92	95,96	100

Sumber: Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Berdasarkan Data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 diketahui bahwa realisasi persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah sebesar 95,96% dari target pada tahun 2024 sebesar 95,92% sehingga terjadi capaian kinerja yang berhasil diraih sebesar 100%.

Pencapaian target ini diperkuat dengan banyaknya terdapat bekas galian tambang timah yang sudah lama ditanggalkan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air baku minimal sehari-hari atau yang biasa disebut masyarakat dengan kolong. Adapun ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Tabel Target dan Realiasi Indikator Kinerja Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

No.	Rumus indikator kinerja	Realisasi	Target	Realiasi
		Ketersediaan air Tahun 2023	Ketersediaan air Tahun 2024	Ketersediaan air Tahun 2024
		(%)	(%)	(%)
1.	Jumlah ketersediaan air baku dari instalasi pengolahan	4.269.958	4.484.219	4.373.839
	Kebutuhan pokok air baku berdasarkan target SDG's	4.461.752	4.679.657	4.557.762
		× 100%	× 100%	× 100%
		= 95,7%	= 95,82%	= 95,96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Dari tabel 3.15 diatas dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 95,82 % atau 4.484.219 m³/tahun ketersediaan air baku berbanding 4.679.657 m³/tahun kebutuhan air baku berdasarkan target SDGs. Capaian realisasi Indikator kinerja sasaran yang pada tahun 2024 adalah sebesar 95,96 % yakni 4.373.839 m³/tahun ketersediaan air baku dari instalasi berbanding 4.557.762 m³/tahun.

Adapun program yang mendukung tercapainya persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku. Target dan realisasi program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Tabel Realisasi program/ kegiatan Indikator Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target	Realisasi Fisik (%)
I	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemeliharaan Sungai diKabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP)	477.999.000	1,3 Km	100%
2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	305.518.288	1	100%

Sumber: APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Tabel 3.17
Pemanfaatan air baku di Kabupaten Bangka Tengah

NO	SUMBER AIR BAKU (Dari Perpipaan)	OUTPUT (LTR/DET)	OPERASI PER HARI		JUMLAH HARI BEROPERASI	KAPASITAS PRODUKSI (m3/ PER TAHUN)	KETERANGAN
			JAM	DETIK			
1	Kolong lubuk (air rumbia)	10	8	28800	330	95,040.00	SPAM IKK Lubuk besar
2	Kolong Jongkong	10	10	36000	345	124,200.00	SPAM IKK Koba
3	Kolong sarkawi	20	6	21600	330	142,560.00	SPAM IKK NIBUNG
4	Kolong Namang (baja)	20	8	28800	340	195,840.00	SPAM IKK NAMANG
5	Kolong Muis (simpangkatis)	10	9	32400	330	106,920.00	SPAM IKK S.KATIS
6	Sungai Sungaiselan	15	6	21600	300	97,200.00	SPAM IKK SUNGAISELAN
7	Kolong Teru (kolong beruas 1)	2	2	7200	50	720.00	SPAM IKK Ds. TERU
8	Kolong Celuak	6	6	21600	340	44,064.00	SPAM Ds. Celuak , Pinang Sebatang
9	Kolong Beruas	2	2	7200	30	432.00	SPAM IKK Ds. BERUAS
10	Kolong Keretak (Mentabak)	2	2	7200	60	864.00	PS- Air bersih Ds. Keretak
11	Kolong Lampur (Menki)						PDAM (Tidak Beroperasi)
12	Kolong Sadap (GRAVITASI)	6	20	72000	365	157,680.00	Mata Air PDAM
13	Kolong Beguruh	0	0	0	0	-	Pengendali Banjir

14	Kolong Kerasak	20	16	57600	365	420,480.00	SPAM IKK PANGKALANBARU
15	Kolong Air PL						Pengendali Banjir
16	Kolong Bravo						Pengendali Banjir
17	Kolong Silok						Pengendali Banjir
18	Kolong Jeruk						Pengendali Banjir
19	Kolong/ mata air di Pangkalraya	8	2	7200	180	10,368.00	IKK Pedesaan Pangkalraya
20	Mata air Tanjung Gunung	8	2	7200	120	6,912.00	IKK Pedesaan
	JUMLAH					1,403,280.00	
	TOTAL KETERSEDIAAN AIR BAKU (NON PERPIPAAN + PERPIPAAN)					4,373,839.80	

Sumber: Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Upaya penanganan pemenuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber baru atau sistem baru dengan pemanfaatan air permukaan
2. Manajemen sistem pengelolaan sumber air baku yang tepat dan bijaksana sehingga kelestarian sumber tetap terjaga.
3. Pemanfaatan secara efektif dan optimal tanpa menimbulkan konflik kepentingan
4. Mengoptimalkan sistem jaringan eksisting sehingga dapat meningkatkan tingkat pelayanan baik secara kualitas maupun kuantitas
5. Memberikan sanksi terhadap maraknya aktivitas tambang timah ilegal.

Tabel 3.18

Daftar Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan
1.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Beguruh Kerasak Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Teru Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Gunung Mangkol Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Celuak Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Muis Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Nibung Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Pemeliharaan Rutin Penyediaan Air Baku Kolong Nona Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama Kegiatan
8.	Pemeliharaan Rutin Pantai Samfur Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Pemeliharaan Rutin Pantai Batu Belubang Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Pemeliharaan Rutin Pantai Terentang Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Pemeliharaan Rutin Pantai Arung Dalam Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Pemeliharaan Rutin Sungai Nibung Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber Data: BWS Bangka Belitung

5. Persentase Luas Sawah yang Beririgasi

Area Potensial Irigasi di Kabupaten Bangka Tengah adalah seluas 391,84 Ha yang terdiri dari 4 Daerah Irigasi, yaitu Daerah Irigasi Namang - Belilik, Daerah Irigasi Kerakas, Daerah Irigasi Sungaiselan Atas dan Daerah Irigasi Teru. Pada tahun 2023, total luas sawah beririgasi di Bangka Tengah adalah 140,55 Ha atau 35,87% dari total luas potensial sawah irigasi

Tabel 3.19
Pelaksanaan Kegiatan Daerah Irigasi Kabupaten Bnagka Tengah

TH	DAERAH IRIGASI	EXISTING TH SEBELUM (HA)	TARGET PENINGKATAN (HA)	TOTAL TARGET PENINGKATAN (HA)	REALISASI PENINGKATAN (HA)	TOTAL REALISASI PENINGKATAN (HA)	KET.
2022	DI Namang - Belilik	106	2	106	0.2	106	BELUM DILAKSANAKAN
	DI Kerakas	12	1	12	0	12	
	DI Sungaiselan Atas	105	2	105	0	105	
	DI Teru	8		8	0	8	
	Total	231	5	235	0.2	231	
2023	DI Namang - Belilik	106	2	106	2.5	108.5	BELUM DILAKSANAKAN
	DI Kerakas	12	1	13	1	13	
	DI Sungaiselan Atas	105	2	107	2	105	
	DI Teru	0		0	0	0	

TH	DAERAH IRIGASI	EXISTING TH SEBELUM (HA)	TARGET PENINGKATAN (HA)	TOTAL TARGET PENINGKATAN (HA)	REALISASI PENINGKATAN (HA)	TOTAL REALISASI PENINGKATAN (HA)	KET.
	Total	223	5	240	5.5	228.5	
2024	DI Namang - Belilik	108.5	2	110.5	22	130.5	TERPEN UHI
	DI Kerakas	13	1	14	0	13	
	DI Sungaisela n Atas	105	2	107	0	105	
	DI Teru	0		0	0	0	
	Total	226.5	5	245	22	248.5	

Tabel 3.20
 Realisasi kinerja Luas Sawah yang beririgasi Tahun 2024

Indikator	Kondisi Tahun 2023		Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Persentase Capaian Target
	Hektare	%	Hektare	%	Hektar	%	%
Luas Sawah yang Beririgasi	140,55	35,87	140,55	35,87	162,55	41,48	112,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah, 2024

6. Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase

Peningkatan pemenuhan infrastrukur dasar merupakan salah satu sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 untuk menunjang Misi 3 yaitu: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Unggul dan Merata. Salah satu infrastruktur dasar yang dimaksud adalah ketersediaan sistem drainase dengan indikator kinerja: Persentase penduduk yang terlayani drainase. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang terlayani drainase adalah sebanyak 121.269 jiwa atau 63,12% dari total jumlah penduduk.

Di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026, target persentase penduduk yang terlayani drainase di Bangka Tengah untuk tahun 2024 adalah 67,18%. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.939.327.000,- di dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun

anggaran 2024. Realisasi penduduk yang terlayani drainase tahun 2024 menjadi 138.712 jiwa atau 67,18%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2024, capaian realisasi indikator ini sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.20 dan Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Tabel Realisasi Kinerja Program Drainase Tahun 2024

Indikator	Kondisi Tahun 2022		Kondisi Tahun 2023		Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Persentase Capaian Target
	jiwa	%	jiwa	%	Jiwa	%	jiwa	%	%
persentase penduduk yang terlayani drainase	125.583	63,12	132.619	64,08	138.712	67,18	138.712	67,18	100.00

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah, 2024

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NAMA KECAMATAN	DESA / KEL.	JUMLAH PENDUDUK (2024)	PELAYANAN DRAINASE		JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI
			DRAINASE PRIMER	DRAINASE SEKUNDER	
KOBAB	GUNTUNG	1.358	66	787	853
	KURAU (TIMUR)	3.247	301	1.651	1.952
	KURAU BARAT	2.262	135	1.083	1.218
	PENYAK	4.710	625	2.454	3.079
	TERENTANG III	1.676	91	1.023	1.114
JUMLAH		13.253	1.218	6.998	8.216
PANGKALAN BARU	MANGKOL	4.455	570	2.132	2.702
	PEDINDANG	3.192	446	2.257	2.703
	TANJUNG GUNUNG	4.384	591	1.685	2.276
JUMLAH		12.031	1.607	6.074	7.681

NAMA KECAMATAN	DESA / KEL.	JUMLAH PENDUDUK (2024)	PELAYANAN DRAINASE		JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI
			DRAINASE PRIMER	DRAINASE SEKUNDER	
SUNGAISELAN	KEMINGKING	2.253	128	762	890
	KERAKAS	1.572	85	810	895
	KERANTAI	1.052	85	341	426
	KERETAK	2.962	322	1.101	1.423
	KERETAK ATAS	2.030	156	818	974
	LAMPUR	5.162	1.090	1.962	3.052
	MELABUN	1.072	81	340	421
	MUNGGU	3.016	282	1.141	1.423
	ROMADHON	2.337	96	1.220	1.316
	SARANG MANDI	2.683	321	1.428	1.749
	TANJUNG PURA	1.380	100	508	608
JUMLAH		25.519	2.746	10.431	13.177
LUBUK BESAR	BATU BERIGA	2.508	85	1.108	1.193
	BELIMBING	1.110	93	835	928
	KULUR	2.987	571	1.386	1.957
	KULUR ILIR	2.140	342	1.261	1.603
	LUBUK BESAR	7.339	1.175	3.810	4,985
	LUBUK LINGKUK	2.844	146	1.160	1.306
	LUBUK PABRIK	5.926	718	1.852	2.570
	PERLANG	8.007	1.042	3.887	4.929
	TRUBUS	1.762	141	721	862
JUMLAH		34.623	4.313	16.020	20.333
NAMANG	BELILIK	2.656	318	1.225	1.543
	BHASKARA BHAKTI	2.573	157	1.225	1.382
	BUKIT KIJANG	1.282	90	900	990
	CAMBAI	1.657	108	1.170	1.278
	CAMBAI SELATAN	1.641	125	1.280	1.405
	JELUTUNG	3.131	173	1.451	1.624

NAMA KECAMATAN	DESA / KEL.	JUMLAH PENDUDUK (2024)	PELAYANAN DRAINASE		JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI
			DRAINASE PRIMER	DRAINASE SEKUNDER	
	KAYU BESI	1.903	120	922	1.042
	NAMANG	3.049	461	1.690	2.151
JUMLAH		17.892	1.552	9.863	11.415
SIMPANG KATIS	BERUAS	2.073	427	930	1.357
	CELUAK	2.286	132	1.585	1.717
	KATIS	1.564	129	1.043	1.172
	PASIR GARAM	2.776	152	1.098	1.250
	PINANG SEBATANG	1.554	274	1.210	1.484
	PUPUT	2.687	231	1.628	1.859
	SIMPANG KATIS	3.081	210	1.552	1.762
	SUNGKAP	2.824	121	857	978
	TERAK	5.468	532	2.116	2.648
	TERU	3.056	201	1.002	1.203
JUMLAH		27.369	2.409	13.021	15.430
JUMLAH TOTAL PENDUDUK TERLAYANI DRAINASE LINGKUNGAN		130.687	13.845	62.407	76.252
JUMLAH TOTAL PENDUDUK TERLAYANI DRAINASE PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN		209.117			140.489
PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI DRAINASE PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN					67.18%

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah, 2024

Identifikasi terhadap masalah-masalah drainase di perkotaan dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan demi menemukan solusi yang tepat. Identifikasi masalah-masalah drainase di perkotaan dan lingkungan juga diperlukan untuk perencanaan drainase di masa depan supaya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berikut ini permasalahan yang kerap dihadapi sistem drainase di perkotaan:

1. Bertambahnya jumlah penduduk

Pertambahan jumlah penduduk pasti diikuti pula dengan meningkatnya jumlah limbah, baik berupa sampah maupun limbah cair. Jika tidak disertai dengan penambahan drainase, maka tentunya ketidaknyamanan akan dirasakan.

2. Pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan

Pengelolaan sampah harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebab sampah berperan besar terhadap pendangkalan dan penyempitan saluran drainase dan juga sungai. Pendangkalan dan penyempitan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung debit air sehingga muncul genangan atau bahkan banjir.

3. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

Kesadaran masyarakat masih terbilang begitu rendah, seperti mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan drainase tersebut, antara lain:

- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Saluran drainase dan sungai bukanlah tempat untuk membuang sampah.
- Pemberian sanksi yang tegas terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai dan drainase.
- Membangun bak kontrol dan saringan supaya sampah di drainase bisa dibuang dengan cepat.
- Mengatur limpasan melalui fasilitas-fasilitas yang bisa menahan air hujan, menyimpan air hujan dan membuat resapan air.

7. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dijelaskan bahwa indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang ke-tujuh adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan

Rencana Tata Ruang. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Kondisi 2023 Akhir (%)	2024			Target RPJMD 2026 (%)	Capaian RPJMD (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
4	erwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten						
4.1	eningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten						
4.1.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	80,91	80,93	80,93	100	80,35	100,72

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Berdasarkan data pada tabel 3.21 di atas dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 diketahui bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang tahun 2024 adalah sebesar 80,93% dari target 80,93%, hal tersebut juga sama pada RPJMD 2021-2026 sehingga capaian Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang telah terpenuhi dengan capaian kinerja 100%. Realisasi tersebut dapat diperoleh dengan rumusan rata rata persentase capaian indikasi program dan persentase kesesuaian pola ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah sebagai Tabel 3.23 dengan rincian masing-masing terdapat pada Tabel 3.24 dan Tabel 3.25.

Tabel 3.24
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Muatan	Persentase (%)
1	Kesesuaian Pelaksanaan Program	n/a
2	Kesesuaian Pola Ruang	80,93%
IKU		80.93%

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Tabel 3.25
Kesesuaian Pola Ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	RENCANA POLA RUANG		LOKASI	LUAS RENCANA (Ha)	SIMPANGAN POLA RUANG						KESESUAIAN POLA RUANG (%)
					KEBUN (Ha)	TAMBANG (Ha)	PERMUKIMAN (Ha)	Area Terbuka (Ha)	JUMLAH (Ha)	PERSENTASE (%)	
I	Kawasan Lindung			40,279.24					12.709,73	31,55%	68,45%
	A	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya									
	a	Kawasan Hutan Lindung	Kec. Lubuk Besar, Kec. Koba, Kec. Sungai Selan dan Kec. Namang	32.348,99	7811,39	3376,18	3,81	382,04	11.573,41	35,78%	64,22%
	b	Kawasan Resapan Air	Desa Penyak Kec. Koba	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	B	Kawasan perlindungan setempat									
	a	Sempadan Pantai		532,90	11,31	0,95	33,18	6,06	51,50	9,66%	90,34%
	b	Sempadan Sungai		833,38	78,93	0,00	10,36	0,00	89,30	10,71%	89,29%
	c	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong		108,29	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	3,79%	96,21%
	d	Kawasan lindung kearifan lokal	Kec. Namang	47,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17%	99,83%
	C	Kawasan Konservasi									
	a	Kawasan Suaka Alam yaitu Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	Sebagian Pulau Gelasa	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	b	Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Hutan Raya Bukit Mangkol	Kec. Simpang Katis, Kec. Namang dan Kec. Pangkalanbaru	6.009,51	249,64	587,79	1,37	81,32	920,11	15,31%	84,69%

No		RENCANA POLA RUANG	LOKASI	LUAS RENCANA (Ha)	SIMPANGAN POLA RUANG						KESESUAIAN POLA RUANG (%)
					KEBUN (Ha)	TAMBANG (Ha)	PERMUKIMAN (Ha)	Area Terbuka (Ha)	JUMLAH (Ha)	PERSENTASE (%)	
	D	RTH Kawasan Perkotaan, meliputi		337.33	337,33	38,69	25,47	7,06	0,00	71,23	21,11%
		a RTH Kecamatan Koba	Kec. Koba	190.59							
		b RTH Kecamatan Pangkalanbaru	Kec. Pangkalanbaru	146.74							
I		Kawasan Budidaya		185,558.84					30.357,58	16,36%	83,64%
	A	Kawasan Hutan Produksi									
		a Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Koba, Kec. Sungai Selan, Kec. Simpangkatis, Kec. Namang, dan Kec. Lubuk	89,812.27	17359,31	6965,89	80,73	4065,92	28.471,85	24.70%	75.30%
	B	Kawasan Pertanian									
		a Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Kec. Namang, Kec. Koba, Kec. Sungaiselan dan Kec. Simpangkatis	599.88	11.61	2.05	0.41	0.00	14.07	2.35%	97.65%
		b Kawasan Holtikultura	Tersebar/Seluruh Kecamatan	-							
		c Kawasan Perkebunan		53,194.50	0.00	611.89	47.47	0.00	659.36	1.24%	98.76%
	C	Kawasan Perikanan									
		a Pengembangan Perikanan Tangkap	Diarahkan di Perairan Selat Bangka, Selat Gaspar, Laut Jawa dan Selat Karimata	-							
		b Perikanan budidaya									

No			RENCANA POLA RUANG	LOKASI	LUAS RENCANA (Ha)	SIMPANGAN POLA RUANG					KESESUAIAN POLA RUANG (%)	
						KEBUN (Ha)	TAMBANG (Ha)	PERMUKIMAN (Ha)	Area Terbuka (Ha)	JUMLAH (Ha)	PERSENTASE (%)	
			1. Budidaya Perikanan Laut	Perairan Pulau Panjang - Pulau Semujur, Pulau Ketawai-Pulau Bebuar, Perairan Tanjung Beriga dan Perairan Pulau Nangka	10,000.00							
			2. Budidaya Perikanan Air Payau	Kec. Sungaiselan, Kec. Pangkalanbaru, Kec. Lubuk Besar, dan Kec. Koba	10,000.00							
			3. Budidaya Perikanan Air Tawar		700.00							
	D	Kawasan Peruntukan Industri										
		a	Sentra Industri Kecil	Tersebar/Seluruh Kecamatan								
		b	Sentra Industri Menengah	Kec. Namang dan Kec. Pangkalanbaru	287.57	0.00	41.41	5.05	0.00	46.46	16.16%	83.84%
	E	Kawasan Pertambangan dan Energi										
		a	Kawasan Pertambangan Mineral	Seluruh Kecamatan	23,379.81	0.00	0.00	15.85	0.00	15.85	0.07%	99.93%
	F	Kawasan Pariwisata		Kec. Koba, Kec. Lubuk Besar, Kec. Pangkalanbaru, Kec. Namang dan Kec. Sungaiselan	1,621.37	91.39	2.34		19.62	113.36	6.99%	93.01%
	G	Kawasan Permukiman										
		a	Permukiman Perkotaan	Kec. Pangkalanbaru, Kec. Koba dan setiap ibukota kecamatan	6,503.60	0.02	812,49	0.00	0.02	812,54	3.31%	96.69%
		b	Permukiman Perdesaan	Tersebar/Seluruh Kecamatan	9,811.58	0.00	802,92	0.00	0.00	802,92	1.05%	98.95%

No		RENCANA POLA RUANG	LOKASI	LUAS RENCANA (Ha)	SIMPANGAN POLA RUANG						KESESUAIAN POLA RUANG (%)
					KEBUN (Ha)	TAMBANG (Ha)	PERMUKIMAN (Ha)	Area Terbuka (Ha)	JUMLAH (Ha)	PERSENTASE (%)	
	H	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		46.74	0.53	2.01	0.00	0.00	2.54	5.44%	94.56%
		a Kawasan Pertahanan TNI AD	Kec. Namang	33.28							
		b Markas Komando Brigadir Mobil Polda	Kec. Pangkalanbaru	13.46							
	I	Kawasan Perkantoran									
		a Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintah Provinsi		121.34	0.00	24,79	0.00	0,01	24.80	12.20%	87.80%
		b Kawasan Peruntukan Perkantoran Kabupaten		146.57	0.00	5.72	0.00	0.00	5.72	3.90%	96.10%
	J	Kawasan TPA	Kec. Koba	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Jumlah				225,838.08	25.657,02	12.650,03	205.29	4.554,98	43.067,32	19.07%	80.93%

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

8. Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dijelaskan bahwa indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang ke sembilan adalah persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten. Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Kondisi 2022 Akhir	Kondisi 2023 Akhir	2024			Target RPJMD 2026	Capaian RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
4	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten							
4.1	Meningkatkan keteraturan dalam penyelenggaraan pertanahan							
4.1.1	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Tabel 3.27
Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten

No	NAMA PELAPOR	URAIAN SENGKETA	PROSES MEDIASI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PENYEROBOTAN LAHAN KOLONG MINFO OLEH SAUDARA DJUMRI HUSIN AHMAD	SUDAH DILAKUKAN BEBERAPA KALI FASILITASI DI KECAMATAN PANGKALAN BARU DAN TINJAUAN DILAPANGAN, MEDIASI BERULANG KALI TAPI PIHAK TIDAK MAU MENANDATANGANI BERITA ACARA
JUMLAH TOTAL			1 KASUS

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangdan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Pada tahun 2024 terdapat satu kasus aduan sengketa tanah untuk dimediasi oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, dari satu kasus tersebut seluruhnya sudah selesai dimediasi baik di tahap Desa maupun Kecamatan.

9. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SAKIP) “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada akhir tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil penilaian Tim APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, memperoleh nilai SAKIP sebesar 81,32 dari target 80 pada PK Induk dan 81,4 pada PK Perubahan 2024. Melalui realisasi tersebut, maka capaian nilai SAKIP adalah sebesar 100%. Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28
 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Memperbaiki <i>Cascading</i> yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai ke staf/ pelaksana/ jabatan fungsional/ operasional)	Melakukan perbaikan <i>cascading</i> serta IKI pegawai sesuai dengan keselarasan antar jabatan dan mengarah pada tujuan dan sasaran indikator Perangkat Daerah	Dokumen IKI/SKP Pegawai PD serta revisi <i>Cascading</i>	Triwulan II Tahun 2024	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun
2	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan	Melakukan pemantauan capaian IKI pegawai dan keselarasannya dengan SKP yang disusun secara periodik.	IKI dan SKP seluruh pegawai	Triwulan II Tahun 2024	Atasan Langsung tiap pegawai	Sudah Selesai Disusun

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
3	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>)	Melakukan dokumentasi dalam setiap pelaksanaan rapat, disertai dengan daftar hadir peserta rapat serta notulen hasil rapat.	Kelengkapan dokumentasi rapat	Triwulan II Tahun 2024	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun
4	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan sosialisasi (saat apel maupun saat rapat rutin dinas) dan publikasi terhadap dokumen akuntabilitas kinerja yang disusun, serta menyampaikan hasil LHE Itda kepada seluruh pegawai untuk dilakukan pemahaman dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan di periode selanjutnya	Meningkatnya nilai kuesioner pemahaman SAKIP pegawai	Triwulan II Tahun 2024	Atasan Langsung tiap pegawai	Sudah Selesai Disusun

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
5	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja	Melakukan dokumentasi saat pembahasan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja bersama dengan Kepala PD, Sekretaris, serta seluruh Kepala Bidang	Dokumentasi Rapat	Triwulan II Tahun 2024	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun
6	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja	Melakukan sosialisasi (saat apel maupun saat rapat rutin dinas) bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan yang disusun bersama dengan data dukung yang sepenuhnya dikumpulkan oleh tiap-tiap bidang pelaksana kegiatan	Meningkatnya nilai kuesioner pemahaman SAKIP pegawai	Triwulan II Tahun 2024	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
7	Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang	Pada PD sudah disusun monev <i>online</i> yang dapat diakses oleh tiap-tiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaporan <i>progress</i> kegiatan bisa diisi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, ada pula lembar <i>google sheet</i> yang bersisikan indikator kinerja program yang diisi oleh Kepala Bidang per triwulan.	Google Sheet monev <i>online</i> dan rapor kinerja	Sejak 2022 - saat ini	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun
8	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindak lanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya	DPUTRP berupaya untuk menyusun Tindak Lanjut LHE setiap tahunnya serta melaksanakan rekomendasi yang ditentukan sesegera mungkin	Matriks TL setiap tahunnya	Setiap periode SAKIP	Ka. Perangkat Daerah	Sudah Selesai Disusun

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

10. Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan rutin yang diselenggarakan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Melalui program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.173.205.100,- dan realisasi sebesar Rp. 7.584.586.361,- atau 82,68%.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Dalam Peraturan Bupati tersebut DPUTRP memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Tugas DPUTRP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan.

Urusan rutin yang menjadi penilaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai tupoksinya sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang adalah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.29
Indeks Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Tahun 2024

Semester	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)
Semester 1	78	80,8
Semester 2	78	80,5

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUTRP

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai SKM **80,5**. Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, serta kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengguna layanan dan perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan serta kualitas sarana dan prasarana

Tabel 3.30
Rincian Kegiatan dan Sub Keegiatannya

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
I	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pelayanan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%
2	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100%	100%
	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan	100%	100%
3	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%

	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	100%	100%
	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
	X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%
	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi	100%	100%
4	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%
	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	100%	100%
	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%
5	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	100%	100%
	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	100%	100%
	X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpenuhinya pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	100%	100%
	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah dinas dan gedung kantor	100%	100%
	X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	100%

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

Dari uraian data di atas dapat diperoleh perhitungan capaian kinerja Pelayanan Perangkat daerah Sesuai Tupoksinya sebesar 100%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 20223 dan 2022 diuraikan tabel 3.28 dibawah ini:

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	Kondisi akhir 2021 (%)	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN %	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN %	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	74,3	74,09	75,24	101,55	75,29	76,13	101,11	77,63	78,24	100,78
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	80,91	80,35	80,91	100,70	80,35	80,91	100,70	80,93	90,47	111,78
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	77,6	80	77,92	97,4	80	80,05	100,06	80	81,32	100,16

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagaimana tabel 3.32 dibawah ini:

Tabel 3.32
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	78,24	79,28	98,68
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90,47	90,17	100,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Perangkat SAKIP Daerah (PD)	81,32	81,4	99,9

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel 3.33 di bawah ini :

Tabel 3.33
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	78,24	79,28	98,68	1.SDM yang memadai 2.Ketersediaan anggaran yang memadai baik APBD dan APBN 3.Koordinasi/ kerjasama yang baik antar stakeholder terutama BPJN Provinsi Bangka Belitung Faktor Penghambat: 1. Angkutan muatan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan 2.Minimnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan dan memelihara kemantapan jalan/ jembatan 3.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara jalan/ jembatan 4.Kenaikan harga material aspal yang hampir setiap tahun	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
						<p>Faktor pendorong:</p> <p>1.SDM yang memadai</p> <p>2.Ketersediaan anggaran yang memadai baik APBD dan APBN</p> <p>3.Koordinasi/ kerjasama yang baik antar stakeholder terutama BPPW Provinsi Bangka Belitung</p> <p>4.Kesadaran yang tinggi masyarakat terkait pentingnya akses air minum</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1.Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran</p> <p>2.Sumber-sumber air baku belum dimanfaatkan secara optimal</p>	<p>Menggunakan data dasar semester 1 dalam penghitungan indikator kinerja, sehingga saat data terbaru rilis, gambaran awal penghitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung indikator kinerja yang sebenarnya.</p>

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
						<p>Faktor pendorong:</p> <p>1.SDM yang memadai</p> <p>2.Ketersediaan anggaran yang memadai baik APBD dan APBN</p> <p>3.Koordinasi/ kerjasama yang baik antar stakeholder terutama BPPW Provinsi Bangka belitung</p> <p>4.Kesadaran yang tinggi masyarakat terkait pentingnya akses air limbah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1.Isu air limbah belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran</p>	<p>Perangkat Daerah bekerja sama dengan stakeholder untuk terus berupaya mengajukan proposal Dana Alokasi Khusus kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar wilayah Bangka Tengah masuk ke dalam lokus/ penerima Dana Alokasi Khusus. Selain itu, usulan-usulan kegiatan juga disampaikan pada pembahasan usulan kegiatan yang bersumber dari dana APBN, APBD 1, dan DABA.</p>

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
						<p>Faktor pendorong:</p> <p>1.Untuk Daerah Irigasi Namang Belilik, akses jalan menuju irigasi mudah dicapai</p> <p>2.Ketercukupan Ketersediaan sumber air untuk mengairi sawah</p> <p>3.Adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mendorong kegiatan pembangunan Daerah Irigasi di Kabupaten Bangka Tengah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1.Belum semua wilayah yang direncanakan untuk sawah belum dicetak secara keseluruhan</p> <p>2. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi yang tercetak</p> <p>3.Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan jaringan irigasi</p>	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
						<p>Faktor pendorong:</p> <p>1.Banyaknya kolong bekas aktifitas tambang yang dijadikan sebagai sumber air baku oleh warga</p> <p>2.Beroperasinya SPAM Desa yang mendorong terpenuhinya kebutuhan air baku</p> <p>3.Adanya kegiatan yang berkaitan dengan sumber air baku seperti Pembangunan Sumur Bor , Embung</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1.Banyak nya aktifitas tambang ilegal yang mengakibatkan rusaknya kualitas air baku di Kabupaten Bangka Tengah</p> <p>2.Kurang nya kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan, kolong maupun sumber air baku yang telah tersedia</p> <p>3.Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan sumber air baku</p>	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90,47	90,17	100,33	<p>Faktor pendorong:</p> <p>1.Optimalisasi pemenuhan RTH dari lahan eks tambang dan fasum fasos perumahan</p> <p>2.Optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan RTRW</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Keterbatasan anggaran untuk proses pembebasan lahan RTH</p> <p>2. Belum adanya juknis yang jelas dari kementerian terkait</p>	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81,32	81,4	99,9		

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.34
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
1	Tujuan: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Jalan Sesuai dengan Potensi Pengembangan Wilayah Pada Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kelancaran Konektivitas Jaringan Jalan yang Lebih Merata	Indikator Tujuan: Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	99,59	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN			
	Sasaran: Meningkatnya kemantapan jalan	Indikator Sasaran: Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten					
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Desa yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilebarkan	77,63 %	
				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	100%	Menunjang
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang di Lebarkan	100%	Menunjang
				Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Tahun Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten	100%	Menunjang
				X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.02.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.02 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.05.09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orng yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
					dibayarkan Pajaknya		
				X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
				X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	100%	Menunjang
2	Tujuan: Tersedianya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Indikator Tujuan 1: Persentas e Rumah Tangga yang Menempat i Hunian dengan Akses Air Minum layak	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Sasaran: Meningkat nya jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan	Indikator Sasaran 1: Persentas e Rumah Tangga yang Menempat i Hunian					

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
	sanitasi yang layak	dengan Akses Air Minum Layak					
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	100%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	100%	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	100%	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	100%	Menunjang
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Pedesaan yang ditingkatkan	100%	Menunjang
		Indikator Tujuan 2: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah	100,26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
		Domestik) Layak					
		Indikator Sasaran 2: Persentas e Rumah Tangga yang Menempat i Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak					
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100%	Menunjang
				Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaa n Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti	100%	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	100%	Menunjang
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen yang Disusun	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100%	Menunjang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
				Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggar aan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100%	Menunjang
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembanguna, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang
				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	100%	Menunjang
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	Menunjang
3	Tujuan: Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator Tujuan 1: Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	112,10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Sasaran 1: Meningkatnya Luasan Sawah Yang Beririgasi	Indikator Sasaran 1: Persentase Luas Sawah yang Beririgasi					
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	100%	Menunjang
		Indikator Tujuan 2: Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	100,14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Sasaran 2: Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Indikator Sasaran 2: Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari					
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
				Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk unit air baku yang dibangun	100%	Menunjang
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	100%	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	100%	Menunjang
		Indikator Tujuan 3: Persentase Penduduk	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
		yang Terlayani Sistem Drainase		SISTEM DRAINASE			
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas sistem drainase	Indikator Sasaran 3: Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase					
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sistem Drainase perkotaan yang dibangun	100%	Menunjang
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	100%	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang sistem drainase yang dipelihara	100%	Menunjang
				Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	100%	Menunjang
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	100%	Menunjang
4	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten	Indikator Tujuan 1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana	100	PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
		Tata Ruang					
	Sasaran 1: Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Indikator Sasaran 1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang					
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggung jawab Masyarakat	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100%	Menunjang
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Sistem Informasi Penataan Ruang	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	100%	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	Menunjang

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan dalam Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.35:

Tabel 3.35

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		9.173.205.100	7.584.586.361		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	16.258.149		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.403.149		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.855.000		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.871.593.100	5.424.720.440		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.861.593.100	5.416.022.240		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.920.000		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	3.778.200		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.950.000	9.050.000		
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.100.000		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.950.000	4.950.000		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000	12.492.555		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	12.492.555		
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	-		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.500.000	233.945.023		
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	69.996.700		
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	300.000		
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.300.000	66.296.500		
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	860.000		
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	96.491.823		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.440.000	728.258.832		
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370.504.000	331.922.972		
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.400.000	196.090.469		
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.536.000	200.245.391		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.722.000	1.159.861.362		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.542.000	69.725.822		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.004.000	487.141.944		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	344.976.000	336.264.396		
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.200.000	116.749.200		
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.980.000		
II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.920.864.000	1.817.217.027	1. Banyaknya aktifitas tambang ilegal yang mengakibatkan rusaknya kualitas air baku di Kabupaten Bangka Tengah 2. Kurangnya kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan, kolong maupun	1. Banyaknya bekas aktifitas tambang yang dijadikan sebagai sumber air baku oleh warga 2. Beroperasinya SPAM Desa yang mendorong

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				<p>sumber air baku yang telah tersedia</p> <p>3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan sumber air baku</p>	<p>terpenuhinya kebutuhan air baku</p> <p>3. Adanya kegiatan yang berkaitan dengan sumber air baku seperti Pembangunan Sumur Bor , Embung</p>
				<p>1. Belum semua wilayah yang direncanakan untuk sawah belum dicetak secara keseluruhan</p> <p>2. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi yang tercetak</p> <p>3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan jaringan irigasi</p>	<p>1. Untuk Daerah Irigasi Namang Belilik, akses jalan menuju irigasi mudah dicapai</p> <p>2. Ketercukupan Ketersediaan sumber air untuk mengairi sawah</p> <p>3. Adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mendorong kegiatan pembangunan Daerah Irigasi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024</p>
8	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	857.792.000	783.517.288		
23	Normalisasi/Restorasi Sungai	485.000.000	477.999.000		
24	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	372.792.000	305.518.288		
9	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.063.072.000	1.033.699.739		
25	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	202.072.000	195.865.427		
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	861.000.000	837.834.312		
III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.936.861.000	2.855.991.377	<p>1. Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran</p> <p>2. Sumber-sumber air baku belum dimanfaatkan secara optimal</p>	<p>1. SDM yang memadai</p> <p>2. Ketersediaan anggaran yang memadai baik APBD dan APBN</p> <p>3. Koordinasi/kerjasama yang baik antar stakeholder terutama BPPW Provinsi Bangka belitung</p> <p>4. Kesadaran yang tinggi masyarakat terkait pentingnya akses air minum</p>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
10	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota.	2.936.861.000	2.855.991.377		
27	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	115.440.000	114.018.258		
28	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	20.000.000	20.000.000		
29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.369.000.000	1.291.615.190		
30	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.432.421.000	1.430.357.929		
IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1,835,180,000	1,751,003,242		
11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	745.972.000	745.630.854		
31	Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	745.972.000	745.630.854		
V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2.480.884.000	2.458.393.959	1. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi secara mandiri	1. SDM yang memadai 2. Ketersediaan anggaran yang memadai baik APBD dan APBN 3. Koordinasi/kerjasama yang baik antar stakeholder terutama BPPW Provinsi Bangka belitung 4. Kesadaran yang tinggi masyarakat terkait pentingnya akses air limbah
12	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.480.884.000	2.458.393.959		
32	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.281.778.000	2.277.658.949		
33	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	30.000.000	29.880.000		
34	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	169.106.000	150.855.010		
VI. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		3.939.327.000	3.871.085.947	1. Banyaknya genangan serta bencana banjir di daerah-daerah rawan banjir 2. Kebiasaan buruk masyarakat yang kerap membuang sampah rumah tangga di saluran drainase	1.Segera menindaklanjuti aduan terkait bencana banjir, salah satunya dengan menggunakan dana tanggap darurat

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					atau Belanja Tidak Terduga (BTT) 2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran drainase (Swakelola DPUTRP) serta giat mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran drainase.
13	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.939.327.000	3.871.085.947		
35	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.066.640.000	1.051.410.424		
36	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	300.000.000	288.300.500		
37	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	515.500.000	515.475.000		
38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	210.000.000	207.312.293		
39	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.628.675.000	1.599.304.988		
40	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	218.512.000	209.282.742		
VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		3.310.000.000	3.284.171.686	1. Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung	1. Adanya petunjuk teknis SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.310.000.000	3.284.171.686		
41	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.310.000.000,00	3.284.171.686		
VIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		39.820.211.900	39.514.520.462	1. Angkutan muatan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan 2. Minim ketersediaan anggaran untuk meningkatkan dan memelihara kemantapan jalan/jembatan 3. Kurang kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara jalan/ jembatan 4. Kenaikan harga material aspal yang hampir setiap tahun	1.Terus berupaya menyampaikan usulan/ proposal terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBN/ DAK. 2. Menginventarisir jalan berdasarkan kondisi jalan sehingga memudahkan penanganan 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan di setiap tahun anggaran.
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	39.820.211.900	39.514.520.462		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
42	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	49.600.000	49.600.000		
43	Pembangunan Jalan	1.575.000.000	1.570.313.180		
44	Rekonstruksi Jalan	17.922.094.900	17.843.491.400		
45	Pemeliharaan Berkala Jalan	17.537.857.000	17.429.932.381		
46	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.735.660.000	2.621.183.501		
IX. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		37.500.000	36.170.200		
16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	37.500.000	36.170.200		
47	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	37.500.000	36.170.200		
X. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.109.500.000	1.025.497.566		
15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	153.400.000	130.064.397		
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	130.190.000	118.559.397		
49	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	23.210.000	11.505.000		
16	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	766.450.000	751.390.537		
50	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	766.450.000	751.390.537		
17	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	78.950.000	52.198.558		
51	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	45.750.000	43.168.558		
52	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	33.200.000	9.030.000		
18	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	110.700.000	91.844.074		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
53	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	25.000.000	18.325.000		
54	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	85.700.000	73.519.074		
XI. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		10.000.000	5.960.000		
19	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.960.000		
55	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.960.000		
XII. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		30.000.000	27.541.529		
20	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	27.541.529		
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	30.000.000	27.541.529		
XIII. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		75.000.000	56.990.000		
21	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	56.990.000		
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	56.990.000		

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.36

Tabel 3.36

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2024			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	78,24	79,28	98,68	51.098.147.900	50.517.208.772	98.86
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90,47	90,17	100,33	1.119.500.000	1.031.457.566	92,13
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81,32	81,4	99,9	9.173.205.100	7.584.586.361	82,68

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan DPUTRP

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan dalam Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.37

Tabel 3.37

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	20.000.000	16.258.149	81,29	18,71
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100%	15.000.000	12.403.149	82,69	17,31

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	16	100%	5.000.000	3.855.000	77,10	22,90
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	6.871.593.100	5.424.720.440	80,97	19,03
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	53	100%	6.861.593.100	5.416.022.240	78,93	21,07
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%	5.000.000	4.920.000	98,40	1,60
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100%	5.000.000	3.778.200	75,56	24,44
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100%	9.950.000	9.050.000	90,95	9,05
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	5.000.000	4.100.000	82,00	18,00
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	4.950.000	4.950.000	100	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	23.000.000	12.492.555	54,32	45,68
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	5	5	100%	15.000.000	12.492.555	83,28	16,72
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	6	100%	8.000.000	0,00	0,00	0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	257.500.000	233.945.023	90,85	9,15
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100%	70.000.000	69.996.700	100	0,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100%	20.000.000	300.000	1,50	98,5

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	100%	66.300.000	66.296.500	99,91	0,01
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	12	12	100%	1.200.000	860.000	71,67	28,33
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%	100.000.000	96.491.823	96,49	3,51
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	4	3	0%	809.440.000	728.258.832	89,97	25,51
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%	370.504.000	331.922.972	89,59	10,41
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100%	200.400.000	196.090.469	97,85	2,15
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100%	238.536.000	200.245.391	83,95	16,05
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	6	6	100%	1.181.722.000	1.159.861.362	98,15	1,85
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100%	75.542.000	69.725.822	92,30	7,70
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	9	9	100%	490.004.000	487.141.944	99,42	0,58
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	8	8	100%	344.976.000	336.264.396	97,47	2,53
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	90	90	100%	121.200.000	116.749.200	96,33	3,67
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100%	150.000.000	149.980.000	99,99	0,01
II	PROGRAM PENGELOLAAN								

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	SUMBER DAYA AIR (SDA)								
5	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100%	857.792.000	783.517.288	91,34	8,66
24	Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	1,3	1,3	100%	485.000.000	477.999.000	98,56	1,44
25	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kolong	1	1	100%	372.792.000	305.518.288	81,95	18,05
6	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan	1	1	100%	1.063.072.000	1.033.699.739	97,24	2,76
26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	0,1930	0,1930	100%	202.072.000	195.865.427	96,93	3,07
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Km	0,8120	0,8120	100%	861.000.000	837.834.312	97,31	2,69
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
7	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota.	SR	257	257	100%	2.936.861.000	2.855.991.377	97,25	2,75
28	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	2	2	100%	115.440.000	114.018.258	98,77	1,23
29	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	5	5	100%	200.000.000	20.000.000	100	0,00
30	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM	5	5	100%	1.369.000.000	1.291.615.190	94,35	5,65

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
31	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	257	257	100%	1.432.421.000	1.430.357.929	99,86	0,14
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
8	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0,13	0,13	100%	745.972.000	745.630.854	99,95	0,05
32	Pembangunan TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Ton	0,13	0,13	100%	745.972.000	745.630.854	99,95	0,05
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
9	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit	257	257	100%	2.480.884.000	2.458.393.959	99,09	4,59
33	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	57	57	100%	2.281.778.000	2.277.658.949	99,82	21,62
34	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	unit	20	20	100%	30.000.000	29.880.000	99,60	0,75
35	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	180	180	100%	169.106.000	150.855.010	88,21	11,71
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
10	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	M	7426	7426	100%	3.939.327.000	3.871.085.947	98,27	3,18
36	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Meter	1600	1600	100%	1.066.640.000	1.051.410.424	98,57	1,43
37	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Meter	548	548	100%	300.000.000	288.300.500	96,10	3,90
38	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Meter	1071	1071	100%	515.500.000	515.475.000	100	0,00

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
39	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Meter	1071	1071	100%	210.000.000	207.312.293	98,72	1,28
40	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Meter	2136	2136	100%	1.628.675.000	1.599.304.988	98,20	1,80
41	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Meter	1000	1000	100%	218.512.000	209.282.742	95,78	4,22
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
11	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	6	6	100%	3.310.000.000	3.284.171.686	99,22	0,78
42	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	6	6	100%	3.310.000.000	3.284.171.686	99,22	0,78
VIII	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN								
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Km	97,42	97,42	100%	39.820.211.900	39.514.520.462	99,23	0,77
43	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Laporan	1	1	100%	49.600.000	49.600.000	100	0,00
44	Pembangunan Jalan	Km	3,30	3,30	100%	1.575.000.000	1.570.313.180	99,70	0,30
45	Rekonstruksi Jalan	Km	4,20	4,20	100%	17.922.094.900	17.843.491.400	99,56	0,44
46	Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	8,92	8,92	100%	17.537.857.000	17.429.932.381	99,38	0,62
47	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	280	280	100%	2.735.660.000	2.621.183.501	95,82	0,18
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
13	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	100	100	100%	37.500.000	36.170.200	96,45	3,55

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
48	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pekerja	100	100	100%	37.500.000	36.170.200	96,45	3,55
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
14	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Dok	2	2	100%	153.400.000	130.064.397	84,79	15,21
49	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	130.190.000	118.559.397	91,07	8,93
50	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100%	23.210.000	11.505.000	49,57	50,43
15	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100%	766.450.000	751.390.537	98,04	1,96
51	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100%	766.450.000	751.390.537	98,04	1,96
16	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100%	78.950.000	52.198.558	66,12	33,88
52	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	100%	45.750.000	43.168.558	94,36	5,64
53	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100%	33.200.000	9.030.000	27,20	72,80
17	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100%	110.700.000	91.844.074	82,97	12,08
54	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang RTR	Dokumen	1	1	100%	25.000.000	18.325.000	73,30	26,70
55	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100%	85.700.000	73.519.074	59,36	40,64
XI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
18	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam	Kasus	1	1	100%	10.000.000	5.960.000	59,60	40,4

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Daerah Kabupaten/Kota								
56	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100%	10.000.000	5.960.000	59,60	40,4
XII	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH								
19	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Satu Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	30.000.000	27.541.529	91,81	8,9
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	30.000.000	27.541.529	91,81	8,9
XII	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
20	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	75.000.000	56.990.000	75,99	24,01
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	75.000.000	56.990.000	75,99	24,01

Sumber : Dokumen Monev Desember 2024, DPUTRP

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 sasaran Perangkat Daerah dengan 9 indikator kinerja program sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	77,63	78.24	100,79
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90,47	90.47	100

No.	Tujuan Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81,4 (nilai)	81,32 (nilai)	99,9

- Sasaran 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dengan capaian kinerja sebesar 100,79% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2: Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,9% (kategori Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 65.589.325.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 63.283.756.968,- atau 96,48% dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,52%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah yang semakin maju.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 188.4/2515/DPUTRP/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional 2020 – 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2008 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 297);
16. Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 297).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

KESATU : IKU Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I beserta target capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

KETIGA : RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026 dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 September 2021

plt. **KEPALA DINAS,**



RAHMAT WIBOWO, S.T.

Pembina Tk. I/ IVb

NIP.19721027 200501 1 006

PERANGKAT DAERAH:	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
TUGAS:	Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan
FUNGSI:	a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Bina Marga Dputrp	Panjang Jalan Status Kabupaten Kondisi Mantap/ Jumlah Panjang Jalan Status Kabupaten x 100%
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dekan Akses Air Minum Dan Sanitasi yang Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Cipta Karya Dputrp; Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Data Penduduk Tahun Berjalan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak/ Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kabupaten x 100%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Cipta Karya Dputrp; Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Data Penduduk Tahun Berjalan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Layak/ Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kabupaten x 100%
3	Meningkatnya Luasan Sawah Yang Beririgasi	Persentase Luas Sawah Yang Beririgasi	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Sumber Daya Air Dputrp	Luas Sawah Yang Beririgasi / Total Luas Sawah Kabupaten x 100%
4	Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Baku	Persentase Tersediannya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Sumber Daya Air Dputrp	Jumlah Ketersediaan Air Baku dari Instalasi Pengolahan/ Kebutuhan Pokok Air Baku Berdasarkan Target SDG's x 100%

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
5	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Sumber Daya Air Dputrp; Data Penduduk Tahun Berjalan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase/ Jumlah Penduduk Kabupaten x 100%
6	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Yang Konsisten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan Dputrp	Realisasi Program Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang tahun yang bersangkutan/ Luas wilayah Bangka Tengah x 100%
7	Meningkatkan Keteraturan Dalam Penyelenggaraan n Pertanahan	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	Kepala Perangkat Daerah Dputrp	Laporan Kinerja Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan Dputrp; Data Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani/ Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan x 100%

Koba, 24 September 2021
 plr Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Bangka Tengah



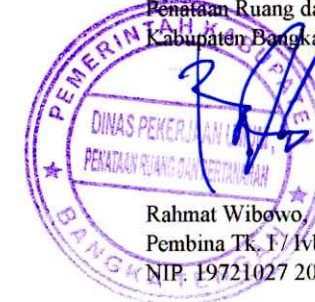
Rahmat Wibowo, S.T.
 Pembina Tk. 1/Ivb
 NIP. 19721027 200501 1 006

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.4/2515/DPUTRP/2021
Tanggal : 24 September 2021

**B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2021) (%)	TARGET (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	69,37	70,47	71,67	72,87	74,07	75,27
2	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	84,42	86,49	88,43	89,8	91,97	93,59
3	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	94,54	95,5	96,4	97,25	98,04	99,08
4	Persentase Luas Sawah Yang Beririgasi	34,45	34,45	35,73	37,00	38,28	39,56
5	Persentase Tersediannya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari- Hari	95,18	95,18	95,45	95,82	95,92	96,14
6	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase	62,48	62,48	64,08	65,58	67,18	68,58
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35
8	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	100	100

Koba, 24 September 2021
plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah



Rahmat Wibowo, S.T.
Pembina Tk. I / Ivb
NIP. 19721027 200501 1 006



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (T-C.27)

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exist ing Tahun n 2020	Exist ing Tahun n 2021 Targe t	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lok asi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN							60.521.83 3.506		74.492.18 1.000		69.186.21 1.600		58.808.60 0.000		81.555.44 9.513		86.912.09 4.464		349.236.32 6.577		
Peningkat an Pelayanan Infrastruk tur Jalan Sesuai dengan Potensi Pengemba nga n Wilayah Pada Pusat - Pusat Pertumbu han Ekonomi Melalui Kelancara n Konektivi tas Jaringan Jalan yang Lebih Merata				%	74,42	70.47		70.47		71.6 7		72.87		74.07		75.2 7		75.2 7			
	Meningkatn ya kemantapan		Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	74,42	70.47		70.47		71.6 7		72.87		74.07		75.2 7		75.2 7			



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp		
	jalan		Jalan Kabupaten																		
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan Kabupate n	%	74,42 %	70.47	27.095.72 6.600	70.47	39.274.95 1.000	71.6 7	45.063.60 3.000	72.87	31.467.19 0.000	74.07	34.613.90 9.000	75,2 7	38.075.29 9.900	75,2 7	188.494.95 2.900		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Desa yang dibangun/ ditingkatka n/ direhabilita si/ dilebarkan	Km		19,00	27.095.72 6.600	22	39.274.95 1.000	20	45.063.60 3.000	47	31.467.19 0.000	51	34.613.90 9.000	55	38.075.29 9.900	195	188.494.95 2.900	DPUTR P	Kab. Bang ka Teng ah
Tersedian ya Akses Masyarak at Terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%		86.49		86.49		88.4 3		89.80		91.97		93.5 9		93.5 9			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air	%		95,50		95,50		96,4 0		97,25		98,04		99,0 8		9908			



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi yang layak		Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	82,22	86.49		86.49		88.43		89.80		91.97		93.59		93.59			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%		95,50		95,50		96.40		97.25		98.04		99.08		99.08			
		Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%		84,42	8.155.441.000	86,49	8.095.700.000	88,43	2.550.000.000	89,80	2.400.000.000	91,97	10.570.000.000	93,59	11.070.000.000	93,59	18.589.700.000		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan/	SR		1000	8.155.441.000	1000	8.095.700.000	250	2.550.000.000	800	2.400.000.000	1100	2.640.000.000	1200	2.904.000.000	4350	18.589.700.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	RP		
			diperbaiki/ dipelihara																		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak	%		95,54	2.663.393.000	95,50	4.544.000.000	96,40	1.650.000.000	97,25	1.425.000.000	98,04	4.750.000.000	99,08	3.650.000.000	99,08	10.910.750.000		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septik yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/ dipelihara	Unit		353	2.663.393.000	400	4.544.000.000	350	1.650.000.000	200	1.425.000.000	200	1.567.500.000	200	1.724.250.000	1350	10.910.750.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak	%		0,00	-	0,00	-	0,00	-	97,25	1.010.000.000	98,04	1.050.000.000	99,08	1.110.000.000	99,08	3.170.000.000		
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pengelolaan persampahan yang	Unit		0	-	0	-	0	-	200	1.010.000.000	200	1.050.000.000	200	1.110.000.000	600	3.170.000.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			dibangun/ditingkatkan/diperbaiki/dipelihara																		
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	%		5,93	5.084.624.000	5,93 %	2.365.000.000	6,50 %	1.590.000.000	7,07 %	1.500.000.000	7,64 %	7.225.000.000	8,20 %	7.225.000.000		19.905.000.000		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang direncanakan/dibangun/direnovasi/direhab	unit		6	5.084.624.000	9	2.365.000.000	6	1.590.000.000	1	1.500.000.000	5	1.650.000.000	5	1.815.000.000	26	8.920.000.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	%		45,66	174.299.320	62,27	165.000.000	69,88	230.000.000	77,07	230.000.000	83,88	425.000.000	90,34	425.000.000	90,34	1.156.300.000		
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang		100	99.699.520	100	105.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	253.000.000	100	278.300.000	500	1.096.300.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan disusun	Dokumen		1	74.599.800	1	30.000.000	-	-	0	-	1	-	1	-	3	30.000.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Sasaran, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi yang disusun	Dokumen		0	-	1	30.000.000	-	-	0	-	1	-	1	-	3	30.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air			Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%		35.73		35.73		37.00		38.28		39.56		40.83		40.83			
			Persentase Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%		95.18		95.45		95.82		95.92		96.14		96.87		96.14			
			Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%		62.48		64.08		65.58		67.18		68.58		70.08		70.08			
	Meningkatnya Luasan Sawah Yang Beririgasi		Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	94,78	35.73		35.73		37.00		38.28		39.56		40.83		39.56			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas sawah yang beririgasi	%		35.73	1.477.354.186	35.73	2.204.220.000	37.00	100.000.000	38.28	4.350.000.000	39.56	2.500.000.000	40.83	2.500.000.000	40.83	16.702.720.000		



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ direhab/ ditingkatkan	Jaringan Irigasi		1	1.477.354.186	1	2.204.220.000	1	100.000.000	1	4.350.000.000	1	4.785.000.000	1	5.263.500.000	5	16.702.720.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku		Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%		95,18		95,45		95,82		95,92		96,14		96,87		96,14			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%		95,18	1.191.600.000	95,45	1.308.030.000	95,82	795.000.000	95,92	700.000.000	96,14	2.625.000.000	96,87	3.210.000.000	96,87	4.420.030.000		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit air baku yang dibangun/ direhab	unit		6	1.191.600.000	5	1.308.030.000	2	795.000.000	5	700.000.000	5	770.000.000	5	847.000.000	22	4.420.030.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Meningkatnya kualitas sistem drainase		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	73,15	62.48		64.08		65.58		67.18		68.58		70.08		70.08			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penduduk yang terlayani drainase			62.48	4.980.860.600	64,08	6.260.300.000	65,58	4.408.000.000	67,18	3.304.000.000	68,58	3.464.000.000	70,08	4.364.000.000	70,08	21.604.540.000		
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang dibangun/ direhab/ dipelihara	Meter		6000	4.980.860.600	8900	6.260.300.000	6812	4.408.000.000	4290	3.304.000.000	4330	3.634.400.000	5530	3.997.840.000	29862	21.604.540.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%		80,35		80		80		80		80		80		80			
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%		80,35	953.260.000	80,35	2.089.370.000	80,35	1.850.000.000	80,35	1.550.000.000	80,35	1.705.000.000	80,35	1.875.500.000	80,35	9.069.870.000		



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen		1	320.205.000	2	1.714.370.000	4	900.000.000	3	900.000.000	3	990.000.000	3	1.089.000.000	15	5.593.370.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen		1	70.500.000	2	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	6	348.250.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen		1	192.580.000	2	150.000.000	2	250.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	10	731.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen		1	369.975.000	2	200.000.000	3	625.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	11	1.487.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten			Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	66.82	100		100		100		100		100		100		100			
	Meningkatkan keteraturan dalam penyelengg		Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang	%	66.82	100		100		100		100		100		100		100			



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	urusan pertanahan		Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten																		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten	%			47.950.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	225.000.000		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang ditangani	kasus		10	37.945.000	3	50.000.000	5	50.000.000	5	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	23	225.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah masyarakat yang didistribusi	%			50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	850.000.000		
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah	Jumlah Dokumen bidang tanah redistribusi	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	850.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang disusun																		
		PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase kecamatan yang tersedia Peta Zona Nilai Tanah dalam Wilayah Kabupaten n Bangka Tengah	%			-	33,33 %	750.000.000	50 %	100.000.000	66,67 %	410.000.000	83,33 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	2.035.000.000		
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peta zona nilai tanah yang disusun	Dokumen		0	-	1	25.000.000	1	100.000.000	1	410.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	5	2.035.000.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	%			-	-	-	100 %	908.240.000	100%	500.000.000	0	-	0	-	100 %	1.408.240.000		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen		0	-	-	-	1	908.240.000	1	500.000.000	0	-	0	-	2	1.408.240.000	DPUTR P	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																			
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Jalan Sesuai dengan Potensi Pengembangan Wilayah Pada Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kelancaran Konektivitas Jaringan Jalan yang			Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%		70.47		70.47		71.67		72.87		74.07		75.27		75.27				



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	RP		
Lebih Merata																					
	Meningkatnya kemandapan jalan		Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	74,42	70.47		70.47		71.67		72.87		74.07		75.27		75.27			
		X.XX.01 Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	2.460.647.000	100	1.903.030.000	100	3.235.817.000	100	3.177.410.000	100	4.270.331.533	100	4.314.364.686	100	16.795.953.219		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai		80	6.186.677.800	80	5.432.580.000	80	6.455.551.600	80	6.560.000.000	80	7.357.208.980	80	8.092.929.878	80	33.898.270.458		



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Sasaran, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2020	Exsisting Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah angkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai		80,00	82.870.000	-	-	80	80.000.000	80	40.000.000	80	126.445.000	80	139.089.500	320	385.534.500	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai		80,00	6.103.807.800	80	5.432.580.000	80	6.375.551.600	80	6.520.000.000	80	7.230.763.980	80	7.953.840.378	400	33.512.735.958	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	-	-	-	100	22.500.000	100	22.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	400	105.000.000	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	191.750.000	-	-	100	370.000.000	100	215.000.000	100	391.433.790	100	430.577.169	400	1.407.010.959	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	304.520.000	100	304.200.000	100	349.023.000	100	325.900.000	100	407.192.830	100	447.912.113	500	1.834.227.943	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai	%		100	215.347.000	-	-	100	399.950.000	100	185.200.000	100	700.662.918	100	430.729.210	400	1.716.542.128	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exist ing Tahun 2020	Exist ing Tahun 2021 Target	Exsisting Tahun 2021 Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Tupoksinya																		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	651.650.000	100	661.200.000	100	902.644.000	100	801.000.000	100	1.092.199.301	100	1.201.419.231	500	4.658.462.532	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%		100	1.097.380.000	100	937.630.000	100	1.191.700.000	100	1.627.810.000	100	1.648.842.694	100	1.773.726.963	500	7.179.709.657	DPUTRP	Kab. Bangka Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERA SUSANTO, SH.**
Jabatan : **Plt. BUPATI BANGKA TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ERA SUSANTO, SH.


Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Pertama,


RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006


**RENCANA KINERJA TAHUNAN (PERUBAHAN)
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Tahun Anggaran: 2024 (Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	77.63%
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90.47%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81.4



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	77.63%
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	90.47%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	81.4

No.	Program	Anggaran	Keterangan/ Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 9,173,205,100	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 898,792,000	APBD
		Rp 202,072,000	DAU SG
		Rp 820,000,000	DAK
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 214,160,000	APBD
		Rp 370,000,000	IF
		Rp 1,369,000,000	DAU SG
		Rp 983,701,000	DAK
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 30,468,000	APBD
		Rp 715,504,000	DAK
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1,559,138,000	APBD
		Rp 921,746,000	DAK
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 866,997,000	APBD
		Rp 510,000,000	DAU SG
		Rp 2,562,330,000	IF
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 730,000,000	APBD
		Rp 2,580,000,000	DAU SG
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 5,376,020,900	APBD
		Rp 11,657,278,000	DAK
		Rp 7,189,670,000	IF
		Rp 13,831,885,000	DBH
		Rp 1,765,358,000	DAU SG
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 37,500,000	APBD
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1,109,500,000	APBD
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 10,000,000	APBD
12	Program Penatagunaan Tanah	Rp 30,000,000	APBD
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 75,000,000	APBD
Jumlah Anggaran		Rp	65,589,325,000.00


PIL. BUPATI BANGKA TENGAH,
ERA SUSANTO, S.H.


 Koba, 14 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,
RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
 Pembina Utama Muda/ IVc
 NIP. 197219272005011006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YURMANSAH, MT.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Koba, 14 Oktober 2024
Pihak Pertama,



YURMANSAH, MT.
NIP.198110122005011010

Nama Eselon III : YURMANSAH, MT.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya (Nilai)	78

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 9,173,205,100	APBD
Jumlah	Rp 9,173,205,100	

Koba, 14 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Sekretaris,

YURMANSAH, MT.
NIP. 198110122005011010



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Pihak Pertama,

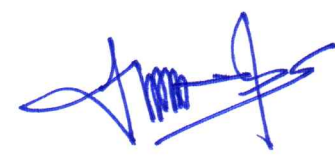
SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc.
NIP. 198211152008042001

Nama Eselon III : **SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc.**
Jabatan : **Kepala Bidang Cipta Karya**
Tahun Anggaran : **2024 (Perubahan)**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	89.80%
Meningkatnya Penyediaan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Limbah Layak	97.25%
Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung yang Ber-IMB	Persentase Bangunan Gedung yang Ber-IMB	7.07%
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Berseftifikat	77.07%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 214,160,000	APBD
	Rp 370,000,000	IF
	Rp 1,369,000,000	DAU SG
	Rp 983,701,000	DAK
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 30,468,000	APBD
	Rp 715,504,000	DAK
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1,559,138,000	APBD
	Rp 921,746,000	DAK
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 730,000,000	APBD
	Rp 2,580,000,000	DAU SG
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 37,500,000	APBD
Jumlah	Rp 9,511,217,000	


**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan**
RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Koba, 14 Oktober 2024
Kepala Bidang Cipta Karya

SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc.
NIP. 198211152008042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWANDI, MT.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Pihak Pertama,

IRWANDI, MT.
NIP. 198104062010011016

Nama Eselon III : IRWANDI, MT.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Luasan Sawah Yang Beririgasi	Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	38.28%
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	95.92%
Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	67.18%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 898,792,000	APBD
	Rp 202,072,000	DAU SG
	Rp 820,000,000	DAK
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 866,997,000	APBD
	Rp 510,000,000	DAU SG
	Rp 2,562,330,000	IF
Jumlah	Rp 5,860,191,000	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan

RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
 NIP. 197210272005011006

Koba, 14 Oktober 2024

Kepala Bidang Sumber Daya Air

IRWANDI, MT.

NIP. 198104062010011016



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS PURNAMA ILHAM, ST.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

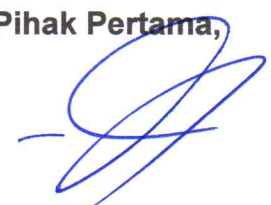
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Pihak Pertama,

AGUS PURNAMA ILHAM, ST.
NIP. 198004252010011014

Nama Eselon III : AGUS PURNAMA ILHAM, ST.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan jalan pada kawasan prioritas bagi penguatan daya saing daerah	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	77.35%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 5,376,020,900	APBD
	Rp 11,657,278,000	DAK
	Rp 7,189,670,000	IF
	Rp 13,831,885,000	DBH
	Rp 1,765,358,000	DAU SG
Jumlah	Rp 39,820,211,900	

Koba, 14 Oktober 2024

Kepala Bidang Bina Marga

AGUS PURNAMA ILHAM, ST.

NIP. 198004252010011014



Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan

RAHMAT WIBOWO, ST., M.M

NIP. 197210272005011006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAKHMAT HIDAYAT, S.AP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT WIBOWO, ST., M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Pertama,



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

RAKHMAT HIDAYAT, S.AP
NIP. 197510182008041002


Nama Eselon III : RAKHMAT HIDAYAT, S.AP
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	80.93%
Meningkatnya Keteraturan dalam Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1,109,500,000	APBD
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 10,000,000	APBD
Program Penatagunaan Tanah	Rp 30,000,000	APBD
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 75,000,000	APBD
Jumlah	Rp 1,224,500,000	


Koba, 14 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan



RAKHMAT HIDAYAT, S.AP
NIP. 197510182008041002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDI, S.P.W.K**
Jabatan : **KEPALA UPTD AIR MINUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUKMA ANGGIA KEMALAFURY, M.Sc.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Pihak Pertama,



DEDI, S.P.W.K
NIP. 198208202011011005

Nama Eselon IV : DEDI, S.P.W.K
Jabatan : Kepala UPTD AIR MINUM
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 214,160,000	APBD
	Rp 370,000,000	IF
	Rp 1,369,000,000	DAU SG
	Rp 983,701,000	DAK
Jumlah	Rp 2,936,861,000	

Koba, 14 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M
NIP. 197210272005011006

Kepala UPTD Air Minum

DEDI, S.P.W.K
NIP. 198406162009031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba – Bangka Tengah 33681
Telp : (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024, Email : pu@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULISSTYONO, A.Md.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YURMANSAH, MT.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

YURMANSAH, MT.
NIP.198110122005011010

Pihak Pertama,


SULISSTYONO, A.Md.
NIP. 198406162009031001

Nama Eselon IV : SULISSTYONO, A.Md.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 9,950,000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 23,000,000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 257,500,000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 809,440,000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,181,722,000	APBD
Jumlah	Rp 2,281,612,000	

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan


YURMANSAH, MT.
NIP. 198110122005011010

Koba, 14 Oktober 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


SULISSTYONO, A.Md.
NIP. 198406162009031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No.01 Koba - Bangka Tengah 33181
Telp. 0823-2323-2529, Email: pu@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH,
NOMOR : 188.47/05 /DPUTRP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4990);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);
12. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas :
1. Melakukan Inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan revidi serta evaluasi atas laporan kinerja;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197210272005011006

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
A	Tim Pengarah	KEPALA DPUTRP
B	Tim Penyusun	
	1) Ketua	SEKRETARIS DPUTRP
	2) Sekretaris	PERENCANA AHLI MUDA
C	Koordinator Teknis	1. Kepala Bidang Cipta Karya
		2. Kepala Bidang Bina Marga
		3. Kepala Bidang Sumber Daya Air
		4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
D	Anggota	
	a. Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Verifikator Keuangan
	b. Bidang Cipta Karya	1. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
	c. Bidang Bina Marga	1. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda 2. Analis Jalan dan Jembatan
	d. Bidang Sumber Daya Air	1. Pengelola SDA Ahli Muda 2. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air
	e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	1. Pengawas Tata Ruang 2. Analis Penataan Kawasan

Ditetapkan di Koba
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197210272005011006

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	73,87
			Persentase RumahTangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	89,80
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,25
			Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	38,28
			Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95,92
			Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	67,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,93
			Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai	80

Ditetapkan di Koba
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197210272005011006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Titian Puspa 3 No.01 Koba - Bangka Tengah 33181
Telp. 0823-2323-2529, Email:pu@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH,
NOMOR : 188.47/64/DPUTRP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4990);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

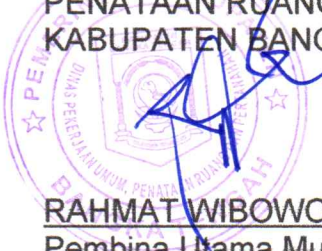
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);
12. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU** : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas :
1. Melakukan Evaluasi dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197210272005011006

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
A	KETUA	SEKRETARIS DPUTRP
B	SEKRETARIS	PERENCANA AHLI MUDA
C	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Cipta Karya 2. Kepala Bidang Bina Marga 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Ditetapkan di Koba
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



RAHMA WIBOWO, ST., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197210272005011006

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	73,87
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	89,80
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	97,25
			Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	38,28
			Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	95,92
			Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	67,18
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Keteraturan Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,93
			Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)	Nilai	80

Ditetapkan di Koba
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


RAHMAT WIBOWO, ST., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197210272005011006